

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media monitoring adalah strategi yang digunakan oleh praktisi *public relations* untuk mengelola media massa. Tujuan media monitoring adalah untuk mengidentifikasi opini publik, aspirasi, dan isu-isu tentang persepsi publik terhadap suatu organisasi tertentu. Selain itu, media monitoring berguna untuk membantu pengambilan keputusan. Media monitoring dilakukan dengan mencari dan menganalisis berita atau informasi tentang tren yang melibatkan organisasi di media massa. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari untuk memahami dinamika pemberitaan di media.¹

Public relations telah menjadi bidang studi dalam kajian ilmu komunikasi. Menurut Jefkins, *public relations* strategi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kepercayaan publik, kredibilitas dan *goodwill*.² Sedangkan John D. Millet menyatakan bahwa tujuan utama *public relations* adalah memberikan pedoman dalam mengidentifikasi apa yang harus dilakukan oleh otoritas sesuai dengan harapan publik.³ Dalam hal ini *public relations* adalah salah satu jenis komunikasi yang paling umum digunakan oleh organisasi untuk melibatkan publik dalam mencapai tujuan bersama.

¹ Nicholas Jevan Pradana dan Intan Primadini, "Peran Komunikasi Korporat dari PT Angkasa Pura I dalam Mengimplementasikan Strategi Media Relations", (Surabaya: *Soetomo Communication and Humanities*, Vol. 2, No. 2, Juli, 2021), hlm. 118–119.

² M Fikri Akbar, Yuli Evadianti, dan Immawati Asniar, *Public Relations*, (Bantul: Ikatan Guru Indonesia, 2021), hlm. 6.

³ Giska Mala Rahmarini, "Aktivitas Humas Sebagai Fungsi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan di Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah", (Palu: *KINESIK*, Vol. 6, No. 3, Desember, 2019), hlm. 281–282.

Organisasi akan membutuhkan bidang *public relations* karena dapat membantu menciptakan hubungan saling percaya antara organisasi dan audiensnya. Praktisi *public relations* akan menangani berbagai isu yang menyebar di publik. Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan media monitoring di media massa untuk menganalisis apa yang terjadi dengan publik sehingga menghasilkan komunikasi yang terencana dan efektif.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tegal sebagai *public relations* di wilayah sektor Pemerintah Daerah (Pemda) berdedikasi membangun dan mempertahankan suasana, citra dan reputasi daerah yang positif.⁴ Diskominfo Kabupaten Tegal berperan sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan warganya. Diskominfo Kabupaten Tegal menggunakan media *online* untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kepada khalayak umum. Dalam hal ini Diskominfo bertanggungjawab mempublikasikan dan mengontrol informasi terkait kebijakan, kegiatan dan kejadian yang perlu diketahui oleh warga Kabupaten Tegal di media *online*.

Diskominfo Kabupaten Tegal menggunakan media monitoring untuk mengelola informasi yang dipublikasikan di media *online*. Pemberitaan yang dikontrol adalah informasi yang dipublikasikan baik oleh internal maupun eksternal organisasi. Media monitoring adalah strategi *public relations* untuk memantau, menganalisis, dan mengevaluasi perkembangan organisasi yang dilaporkan di media. Kegiatan media monitoring dilakukan untuk mencari

⁴ Koesworo Setiawan, "Komunikasi Konteks Rendah sebagai Strategi Penguatan Citra Kelembagaan di Kementerian Sosial", (Jakarta: *CoverAge Journal of Strategic Communication*, Vol. 12, No. 2, Maret, 2022), hlm. 123.

dan menganalisis berita yang bersentimen atau respon yang positif, netral, atau negatif. Pemberitaan yang bersentimen negatif akan diteruskan ke lembaga pemerintah terkait agar ditindak lanjuti atas pemberitaan tersebut. Kegiatan media monitoring dilakukan juga dapat dijadikan tolak ukur untuk penilaian atas kinerja organisasi.

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) merupakan organisasi yang memiliki misi mensosialisasikan dan melawan bahaya berita *hoax* di masyarakat Indonesia. Dirilis dari Kompas.com, MAFINDO telah menghimpun informasi sejumlah berita *hoax* yang beredar di Indonesia. Pada tahun 2019 terdapat 1.221 berita *hoax*, namun pada tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 2.298 berita *hoax*. Pada tahun 2019–2020, MAFINDO mencatat bahwa berita *hoax* yang paling banyak beredar adalah tentang agama, politik, dan kesehatan.⁵

Menurut data tersebut bahwa berita *hoax* terkait agama menduduki peringkat pertama. Berita *hoax* tentang agama yang tidak segera ditangani dapat menimbulkan konflik serta perpecahan bangsa. Mirisnya lagi, masyarakat tidak memiliki cara untuk membedakan antara berita faktual dan berita *hoax*.⁶ Kondisi tersebut jika tidak ditangani dapat menyebabkan aksi terorisme karena tingkat literasi digital di masyarakat yang belum merata.

⁵ Farid Assifa, “Berita Hoaks Di Indonesia Meningkat, Mayoritas Soal Agama, Politik, dan Kesehatan”, (Jakarta: Kompas.com, 5 Juni 2021), <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/05/153205565/berita-hoaks-di-indonesia-meningkat-mayoritas-soal-agama-politik-dan?page=all>.

⁶ Suf Kasman, “Sistem Verifikasi Menangkal Berita Hoax Di Media Cetak”, (Makassar: *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, Vol. 2, No. 1, Oktober, 2019), hlm. 7.

Corona Virus Disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus tersebut menyerang pada pernapasan manusia. Dirilis dari Kompas.com, kasus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Presiden Joko Widodo mengumumkan terdapat warga negara Indonesia (WNI) tertular COVID-19 pada 2 Maret 2020.⁷ Pandemi COVID-19 menyebar secara cepat sehingga pemerintah harus cepat merespon pandemi tersebut. Pemerintah melakukan upaya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19 dan vaksinasi

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberlakukan kebijakan PPKM Darurat mulai tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali. Sehubungan dengan kebijakan tersebut, Bupati Tegal mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019. Hal ini Kabupaten Tegal masuk kriteria level 3 (tiga). Instruksi tersebut menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, sektor non esensial diberlakukan *work from home* (WFH), pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum tidak menerima makan di tempat (*dine-in*), kegiatan

⁷ Ihsanuddin, "Dua WNI Yang Positif Virus Corona Tinggal Di Depok," Kompas.com, 2020, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/03/02/12041761/dua-wni-yang-positif-virus-corona-tinggal-di-depok>.

pada pusat perbelanjaan, tempat ibadah, fasilitas umum, destinasi wisata, kegiatan yang menimbulkan massa ditutup sementara.⁸

Penutupan sementara pada tempat ibadah dalam kebijakan PPKM Darurat tersebut menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tegal ikut angkat suara. Dirilis dari pantura.suramerdeka.com MUI Kabupaten Tegal meminta untuk tempat ibadah jangan ditutup total. MUI Kabupaten Tegal menilai bahwa penutupan tempat ibadah akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena masyarakat Kabupaten Tegal mayoritas beragama Islam. Wakil Ketua MUI, Tubagus Fahmi menyatakan bahwa tempat ibadah seharusnya bisa menjadi sentra edukasi bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona yang tengah melonjak saat ini.⁹

Selain Kebijakan PPKM, Pemerintah juga menerapkan kebijakan vaksinasi untuk solusi meningkatkan kekebalan imunitas tubuh masyarakat sehingga dapat menimalisir penyebaran COVID-19. Pemerintah Jawa Tengah menghimbau kepada pemimpin daerah Kota atau Kabupaten untuk melakukan vaksinasi hingga mencapai 70 persen. Namun Kabupaten Tegal tercatat vaksin dosis pertama capaian 63,18 persen. Dirilis dari Suara Merdeka, sebagian warga Kabupaten Tegal khususnya di Kecamatan Bojong menolak vaksinasi yang diduga terpengaruh oleh ulama. Hal tersebut terjadi

⁸ Pemerintah Kabupaten Tegal, "Intruksi Bupati Tegal Nomer: B.935 Tahun 2021," ppid.tegalkab.go.id, 2021, <https://ppid.tegalkab.go.id/open/file/61371d7d3b6e3/fc9ceb8a4359eebe40a8dd1accfe9846>.

⁹ Dwi Putra, "MUI Minta Tempat Ibadah Jangan Ditutup Total," pantura.suramerdeka.com, 2021, <https://pantura.suramerdeka.com/pantura-raya/pr-06425506/mui-minta-tempat-ibadah-jangan-ditutup-total>.

karena masyarakat cenderung lebih percaya para tokoh agama maupun masyarakat.¹⁰

Untuk menjalankan kebijakan PPKM dan vaksinasi, diperlukan pemantauan kebijakan tersebut. Diskominfo Kabupaten Tegal dalam mendorong kesuksesan kebijakan pemerintah, berusaha untuk memantau dan mengontrol persepsi publik. Media monitoring dapat melihat tingkat keberhasilan penerapan kebijakan PPKM dan vaksinasi. Kegiatan media monitoring bertujuan merancang komunikasi antara pemerintah dan warganya untuk menyampaikan konteks kebijakan pemerintah secara efektif dan efisien. Melalui media monitoring diharapkan berita terkait agama yang mengandung sentimen negatif dapat dikomunikasikan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tegal sehingga dapat ditangani lebih awal terkait berita keagamaan yang berpotensi menjadi isu.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut periset tertarik untuk meneliti bagaimana strategi monitoring berita keagamaan pada masa pandemi COVID-19 dan bagaimana manajemen isu keagamaan yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal. Maka dari itu periset mengambil judul penelitian “Strategi Monitoring Berita Keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi”.

¹⁰ Cun Cahya, “Sebagian Masyarakat Kabupaten Tegal Menolak Vaksinasi, Taj Yasin Lakukan Pendekatan Khusus,” suaramerdeka.com, 2022, <https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042313786/sebagian-masyarakat-kabupaten-tegal-menolak-vaksinasi-taj-yasin-lakukan-pendekatan-khusus>.

B. Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah penelitian yang akan diteliti, diantaranya:

1. Bagaimana strategi monitoring berita keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana strategi pengelolaan isu keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Berikut beberapa tujuan dari permasalahan periset yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui strategi monitoring berita oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada masa pandemi COVID-19;
2. Untuk mengetahui strategi pengelolaan isu keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada masa pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan panduan untuk meningkatkan di bidang *public relations* dan media monitoring. Tujuan dari penelitian sebagai titik awal untuk penelitian yang akan datang dan memberikan penelitian komparatif terkait bidang *public relations* yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mendiskusikan tujuan yang diinginkan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan tentang media monitoring kepada para praktisi dan sarjana di bidang *public relations* sehingga dapat digunakan sebagai alat referensi untuk belajar tentang media monitoring. Kegiatan media monitoring dimaksudkan untuk memantau perkembangan berita di tengah perkembangan teknologi digital. Pemanfaatan menggunakan penelitian untuk instansi terkait, khususnya Diskominfo Kabupaten Tegal, dapat menggunakan data yang diperoleh peneliti untuk digunakan sebagai bahan masukan untuk menjadikan media monitoring lebih baik lagi kedepannya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teoritis

a. *Public Relations*

Bidang *public relations* merupakan salah satu strategi komunikasi yang strategis bagi organisasi untuk menjalin pada publiknya. Menurut *Institute of Public Relations (IPR)*, *public relations* adalah strategi yang dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan antara organisasi dan publik.¹¹ Cutlip & Center mendeskripsikan *public relations* sebagai bidang pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan pandangan melalui karakter positif

¹¹ M Linggar Anggoro, *Teori & Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 1-2.

dan komunikasi dari dua sudut yang saling terarah.¹² Oleh karena itu, seorang praktisi *public relations* senantiasa membutuhkan komunikasi yang efektif dan kemampuan untuk mendapatkan masukan dari publik. Upaya *public relations* harus mencakup komunikasi yang berfokus pada umpan balik karena ini sangat penting. Landasan komunikasi *public relations* adalah umpan balik.

Salah satu fungsi manajemen dalam organisasi yakni bidang *public relations* untuk mengelola organisasi dan publik. Karena itu, *public relations* dapat membantu organisasi dan audiens dengan melakukan percakapan dua arah. Peranan ini dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam hal tujuan dan sasaran bersama organisasi. *Public relations* adalah profesi yang melakukan komunikasi perusahaan dengan jangkauan luas dan memupuk reputasi positif melalui komunikasi yang efektif.¹³ Untuk memahami apa yang dikatakan publik, praktisi *public relations* harus menggunakan taktik komunikasi yang efektif.

b. Media Monitoring

Public relations memiliki berbagai strategi untuk membangun dan memelihara organisasi, salah satunya dengan media monitoring. Kegiatan media monitoring dimaksudkan untuk mencegah publikasi berita bersifat negatif di media yang mengancam reputasi organisasi.

¹² Morissan, *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 7.

¹³ Rosady Ruslan, *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi*, (Jaka: PT RajaGrafindo Persada, 2007) hlm. 24.

Media monitoring dilakukan dengan setiap hari untuk mengikuti berita-berita yang muncul di media arus utama. Organisasi akan memonitor berita di media terkait dengan informasi organisasi. Dalam media monitoring, *public relations* akan menganalisis berita tersebut untuk menentukan pemberitaan tersebut akan menimbulkan pemberitaan bersifat positif, netral, negatif. Kegiatan tersebut sebagai upaya *public relations* mencari pemberitaan negatif yang akan ditindaklanjuti agar reputasi intansi tidak menurun.¹⁴

Public relations melakukan strategi untuk mempertahankan orgnisasi dengan citra atau reputasi yang baik. *Public relations* mengelola opini publik untuk menjalankan kebijakan atau program organisasi guna tercapainya tujuan. Dalam mengelola opini publik, *public relations* melakukan media monitoring berita yang berpotensi negatif guna ditangani lebih awal. Jika ditemukan isu yang mengancam reputasi organisasi untuk segera ditindaklanjuti dengan pihak terkait.

c. Manajemen Isu

Isu merupakan pemikiran yang memiliki potensi dampak buruk pada organisasi atau publik. Manajemen isu adalah proses mengidentifikasi isu-isu yang muncul yang mungkin menjadi kritis. Manajemen isu bertujuan untuk meminimalkan risiko, menentukan prioritas dan mengelola citra organisasi. Identifikasi potensi isu dan

¹⁴ Aditya Ilham Gunawan dan Renata Anisa, “Kegiatan Media Monitoring Humas Pemerintah Kota Cimahi”, (Jakarta: *Ekspresi Dan Persepsi Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, Juli, 2020), hlm. 128–130.

respon yang terorganisasi pada proses kebijakan publik merupakan faktor dalam mengelola isu.¹⁵

Pada saat isu tersebut muncul, Register & Larkin menyarankan untuk mengenali perasaan sebenarnya dari publik dan strategi praktisi media. Organisasi perlu mengenali diri dengan perkembangan isu melalui monitoring informasi. Upaya mengelola isu dilakukan dengan cara identifikasi masalah, perencanaan dan program, implementasi dan evaluasi.¹⁶ Tujuan manajemen isu adalah untuk memungkinkan organisasi mengukur opini publik atau perubahan sifat suatu isu sehingga mereka dapat menanggapi dengan cara yang bijaksana.

2. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang akan dilakukan harus didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh I Komang Agus Widiantara (2020) berjudul “Strategi *Public Relations* Pemprov Bali Menuju Bali Bebas Sampah Plastik”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi kehumasan yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam mencanangkan program pengumpulan sampah plastik di sekitar Provinsi Bali. Teori yang diterapkan dalam penelitian

¹⁵ Keith Butterick, *Pengantar Public Relations: Teori Dan Praktik* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 82-83.

¹⁶ Firsan Nova, *Crisis Public Relations: Strategi Public Relations Menghadapi Krisis, Mengelola Isu, Membangun Citra, Dan Reputasi Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2011), hlm. 239-240.

ini yakni strategi *public relations* dan teori manajemen krisis. Artikel ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan sudut pandang konstruktivisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali menggunakan siasat strategi *public relations* untuk meningkatkan kesadaran tentang tidak menggunakan plastik. Strategi yang digunakan yakni defensif, adaptif, dan dinamis terhadap krisis yang melibatkan penggunaan sampah plastik. Pemerintah Provinsi Bali melakukan kegiatan yang mendorong terwujudnya reputasi Bali yang positif.¹⁷

Persamaan penelitian ini yakni mengkaji strategi komunikasi untuk menjalankan Peraturan Gubernur Bali terkait program penanganan sampah plastik. Perbedaan penelitian ini pada kegiatan monitoring yang berfokus pada berita keagamaan pada masa COVID-19.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Angga Noviar dan Achmad Lutfi (2020) berjudul “Implementasi Kebijakan Program Monitoring dan Aspirasi Publik melalui Media Massa di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Periode Januari-Desember 2019)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program monitoring pemberitaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Teori yang diterapkan dalam penelitian ini yakni teori partisipasi publik dan teori kebijakan publik. Penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian

¹⁷ I Komang Agus Widiantara, “Strategi Public Relations Pemprov Bali menuju Bali Bebas Sampah Plastik”, (Denpasar: *Ganaya Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2–3, Januari, 2020), hlm. 84–91.

kualitatif paradigma post-positivism. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa program media monitoring berperan penting dalam menjaga koridor kerja pada kondisi yang telah ditentukan, sehingga kepatuhan pemangku kepentingan dapat tanggap terhadap keinginan masyarakat.¹⁸

Persamaan penelitian ini yakni mengkaji penerapan monitoring dan aspirasi di media massa. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yakni kegiatan monitoring pada media untuk memonitoring berita keagamaan pada masa COVID-19. Sedangkan pada penelitian Angga Noviar dan Achamd Lutfi hanya mengevaluasi program monitoring dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Euis Atika, Maulana Rifai dan Ana Fitriana Poerana (2021) berjudul “Peranan *Public Relations* dalam Mensosialisasikan Program Vaksin Covid-19 di Kota Bekasi”. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peranan humas di Kota Bekasi dalam menginformasikan program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Kota Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian yakni teori peranan *public relations* dan teori *instrumental model of persuasion*. Penelitian yang dimaksud menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa

Artikel ini membahas humas Pemerintah Kota Bekasi menerapkan

¹⁸ Angga Noviar dan Achmad Lutfi, “Implementasi Kebijakan Program Monitoring dan Aspirasi Publik melalui Media Massa di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Periode Januari-Desember 2019)”, (Jakarta: *Jurnal Reformasi Administras Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, Vol. 7, No. 2, September, 2020), hlm. 80–87.

peranan humas sehingga Pemerintahan Kota Bekasi dapat mengkomunikasikan program vaksinasi serta mengajak warga Kota Bekasi untuk berpartisipasi. kepada masyarakat Kota Bekasi untuk mengajak warganya ikut berpartisipasi.¹⁹

Persamaan penelitian ini yakni mengkaji peranan humas dalam mensosialisasikan dan menyukseskan program pemerintah. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yakni jenis programnya dan strategi *public relations* yang berfokus pada media monitoring.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Meliana Sandra Dewi dan Itca Istia Wahyuni (2022) berjudul “Strategi Media Monitoring pada Pemberitaan Covid-19 di Media Daring (Langkah Preventif Biro Humas Pemprov Jabar dalam Mendeteksi Berita Hoax Mengenai Covid-19)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi media monitoring yang digunakan oleh humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendeteksi berita Covid-19 sebagai langkah pencegahan terhadap berita yang tersebar sebagai *hoax* melalui media *online*. Teori yang digunakan pada penelitian tersebut yakni teori *public relations*, teori konsep strategi humas, dan media monitoring. Penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian kualitatif deksriptif dengan paradigma konstruktivisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki strategi mendeteksi berita *hoax* terkait Covid-19

¹⁹ Euis Atika, Maulana Rifai, dan Ana Fitriana Poerana, “Peranan Public Relations dalam Mensosialisasikan Program Vaksin Covid-19 di Kota Bekasi”, (Cirebon: *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 6, No. 10, Oktober, 2021), hlm. 4983–4994.

melalui kegiatan media monitoring. Laporan kegiatan media monitoring akan dilaporkan kepada pimpinan untuk dijadikan rekomendasi.²⁰

Persamaan penelitian ini yakni mengkaji strategi monitoring pemberitaan di media daring. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yakni pada jenis pemberitaan keagamaan pada masa pandemi COVID-19. Sedangkan penelitian dari Meliana Sandra Dewi dan Itca Istia Wahyuni menggunakan pemberitaan secara umum terkait COVID-19.

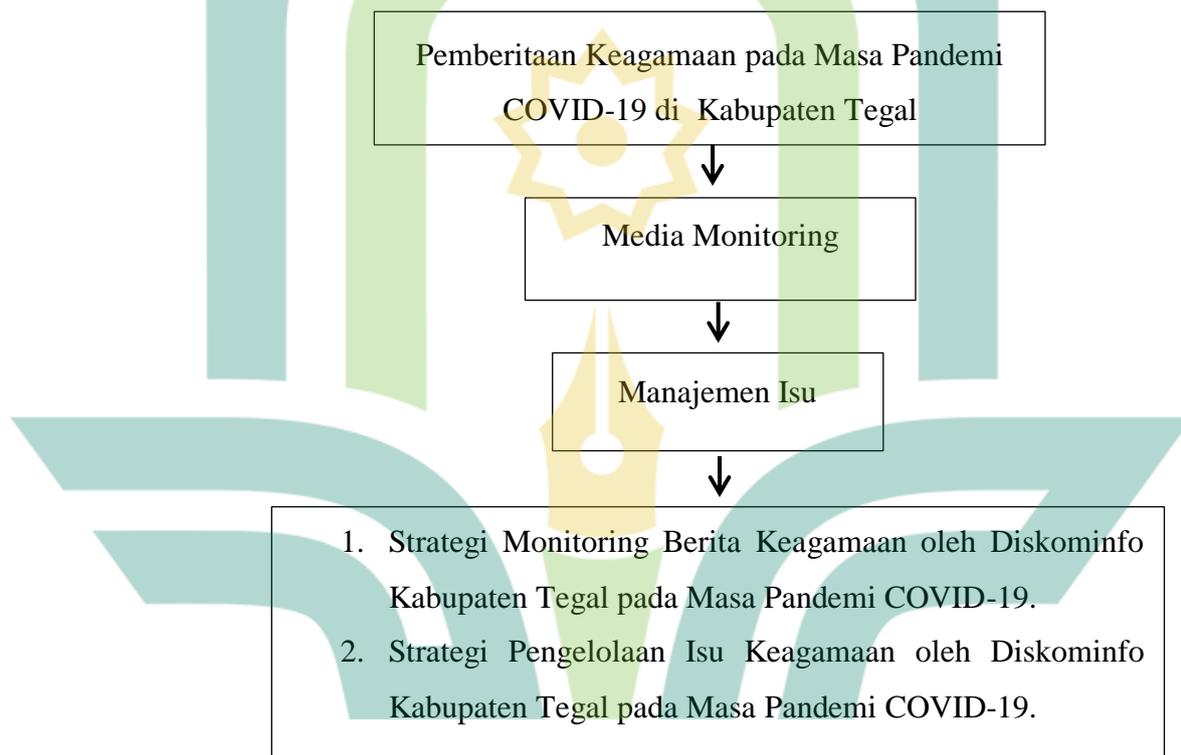
Kelima, jurnal yang ditulis oleh Deskia Putri Harahap dan Maman Chatamallah (2022) berjudul “Peran *Public Relations* PT. Pos Indonesia dalam Memantau Opini Publik”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami media monitoring dan strategi humas PT. Pos Indonesia untuk mengukur opini publik. Teori yang diterapkan pada penelitian tersebut yakni strategi *public relations*. Penelitian tersebut menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa program media monitoring dapat memberikan informasi tentang bagaimana persepsi publik terhadap suatu perusahaan dan dapat mengidentifikasi setiap kecondongan dalam laporan yang berkaitan dengan PT. Pos Indonesia.

²⁰ Meliana Sandra Dewi, “Strategi Media Monitoring Pada Pemberitaan Covid-19 di Media Daring”, (Baubau: *Medialog Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, April, 2022), hlm. 35–43.

Hal ini memungkinkan PT. Pos Indonesia untuk mengkomunikasikan strategi dan tujuan kehumasannya untuk masa depan.²¹

Persamaan penelitian ini yakni mengkaji strategi humas melalui media monitoring. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan yakni media monitoring lebih fokus untuk memperhatikan berita keagamaan. Sedangkan pada penelitian Deskia Putri Harahap dan Maman Chatamallah media monitoring yang dilakukan untuk mempertahankan reputasi PT. Pos Indonesia.

3. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

²¹ Deskia Putri Harahap dan Maman Chatamallah, "Peran Public Relations PT. Pos Indonesia Dalam Memantau Opini Publik", (Bandung: *Bandung Conference Serie Public Relations*, Vol. 2, No. 1, Januari 2022), hlm. 313–318.

Pemberitaan keagamaan pada masa pandemi COVID-19 dapat mengakibatkan potensi atau implikasi negatif kepada pemerintah. Diskominfo Kabupaten Tegal sebagai *government public relations* berperan dalam mengonter pemberitaan keagamaan untuk mempertahankan reputasi Pemda Kabupaten Tegal. Hal tersebut menjadikan Diskominfo Kabupaten Tegal untuk melakukan media monitoring pada masa pandemi COVID-19. Kegiatan media monitoring dilakukan untuk memantau pemberitaan keagamaan pada masa COVID-19 serta mengelola isu keagamaan dari berita yang bersifat negatif. Melalui penelitian ini, dianalisis menggunakan teori media monitoring dan manajemen isu. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan terkait strategi monitoring berita keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada masa COVID-19 dan strategi pengelolaan isu keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada masa pandemi COVID-19

F. Metodologi Penelitian

1. Paradigma/Perspektif Penelitian

Paradigma atau perspektif penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Menurut perspektif konstruktivis, pengetahuan dapat dilihat sebagai hasil atau reaksi terhadap kelangsungan hidup manusia. Paradigma konstruktivis menyatakan bahwa realitas sosial itu ada dalam dunia subjektif yakni apa yang dipersepsi oleh individu. Konstruktivisme digambarkan sebagai kerja kognitif individu dalam mengenali realitas

yang ada di dunia.²² Penelitian ini mengungkapkan beberapa pemahaman melalui realitas yang telah dibangun karena paradigma yang digunakan untuk memandang realitas sebagai produk konstruksi individu yang telah dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang. Pada penelitian ini, konstruksi realitas mengenai strategi media monitoring berdasarkan pengalaman informan dalam identifikasi serta proses penyusunan strategi media monitoring.

2. Pendekatan, Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kata dan frasa yang dapat dipahami banyak orang untuk mengumpulkan data deskriptif.²³ Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dihadapi informan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi lapangan berjenis observasi nonpartisipan. Metode wawancara mendalam adalah penelitian yang melibatkan wawancara tatap muka yang dilakukan terus menerus untuk mendapatkan informasi dari informan. Penelitian ini mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi dari kesadaran melalui pengalaman informan. Metode observasi nonpartisipan merupakan metode untuk mengamati langsung objek yang di riset.²⁴

²² Rachmat Kriyantono, "Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Dan Kualitatif", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 25.

²³ Kriyantono, hlm. 29-30.

²⁴ Kriyantono, hlm 232-234.

Pada observasi ini periset tidak memposisikan dirinya sebagai anggota subjek yang akan diriset.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Deskriptif adalah metode penjabaran data yang sistematis, akurat, dan terpercaya yang berpegang pada prinsip menggali kedalaman atau makna data yang lebih mendalam.²⁵ Penelitian ini menganalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena tentang strategi media monitoring. Dalam hal ini, Diskominfo Kabupaten Tegal menggunakan media monitoring untuk memantau dan mengelola pemberitaan keagamaan pada masa pandemi COVID-19.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan informasi tentang setiap fenomena yang sedang dipelajari. Lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal.

4. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi dan data yang dapat membantu penelitian. Subjek penelitian ini adalah pegawai Diskominfo bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Tegal. Terdapat kriteria yang dipertimbangkan dalam penelitian ini seperti yang tercantum berikut;

²⁵ Kriyantono, hlm 32.

- a. Memiliki pemahaman terkait media monitoring;
- b. Pelaksana media monitoring pemberitaan;
- c. Memiliki pengalaman dalam bidang *public relations*.

5. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling digunakan untuk mengumpulkan sampel data penelitian. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan penarikan sampel *non-random* berjenis *pusposive sampling*. Teknik *pusposive sampling* ini merupakan teknik penarikan dengan sengaja. Penarikan sampel tersebut dengan memilih informan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.²⁶ Penelitian ini memilih informan yang memahami serta mempunyai pengalaman terkait mengelola media monitoring di Diskominfo Kabupaten Tegal untuk menjaga validitas dan reliabilitas data.

6. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua sumber data pada penelitian ini, yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer yakni data pokok yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian melalui informasi yang ada di lapangan.²⁷ Penelitian ini menggunakan data primer melalui metode wawancara mendalam dan observasi nonpartisipan yang berdasarkan dari informan Diskominfo Kabupaten Tegal.

²⁶ Kriyantono, hlm 313-318.

²⁷ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer dengan memanfaatkan informasi dan dokumen yang saling mendukung.²⁸ Data yang diambil dari literatur yang mendukung penelitian ini. Data diperoleh dari jurnal yang masih relevan dengan penelitian ini.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara periset dengan informan yang diasumsikan memiliki informasi penting. Wawancara mendalam yang bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab secara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat.²⁹ Pada wawancara ini periset mewawancarai informan yakni pengelola media monitoring di Diskominfo Kabupaten Tegal untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam.

b. Observasi

Observasi adalah proses mengamati satu objek secara perlahan-lahan untuk melihat keterkaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh objek yang bersangkutan. Observasi membantu untuk memperoleh informasi atau data berdasarkan fakta dan cenderung

²⁸ Anggito and Setiawan.

²⁹ Kriyantono, hlm. 289-292.

memiliki nilai kebenaran yang tinggi karena peneliti melihat masalah dari sudut pandang subjek.³⁰ Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan pengamatan tanpa ikut terjun dalam aktivitas media monitoring.

8. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah suatu metode untuk menentukan kredibilitas suatu data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode. Triangulasi metode yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis dengan cara membandingkan data guna memperoleh informasi yang akurat.³¹ Penelitian ini membandingkan data transkrip wawancara dan hasil observasi untuk menguji keabsahan data yang diperoleh.

9. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisis data yang dilakukan oleh periset. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, analisis data kualitatif memerlukan empat langkah yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³² Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengklasifikasi beberapa topik ke dalam kategori yang sesuai. Proses kondensasi data juga dilakukan secara kolaboratif dan meliputi langkah-langkah penyortiran, fokus, penyederhanaan, peringkasan, dan perubahan data menjadi kumpulan tulisan yang utuh, serta tidak membuang data begitu saja karena jumlah

³⁰ Kriyantono, hlm 300-301.

³¹ Sugeng Pujileksono, "Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif," 2015.

³² Kriyantono, hlm 359.

data yang cukup banyak. Data yang dianggap berada di luar fokus penelitian akan diringkas, sehingga data tersebut digunakan untuk membuat riwayat khusus untuk dianalisis. Tahap terakhir dilakukan dengan mengambil dan memverifikasi sajian data yang telah dibuat sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi pada penelitian ini tidak jauh beda dengan penyusunan skripsi pada umumnya:

Bab I: Memuat uraian meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Memuat akan menjelaskan terkait kajian kepustakaan yang meliputi konseptual *public relations*, media monitoring, manajemen isu, media massa dan *new media*.

Bab III: Membahas tentang gambaran umum Diskominfo Kabupaten Tegal dan hasil penelitian.

Bab IV: Memuat analisis hasil penelitian strategi monitoring berita keagamaan oleh Diskominfo pada masa pandemi COVID-19.

Bab V: Memuat bagian penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat pula saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

PUBLIC RELATIONS, MEDIA MONITORING, MANAJEMEN ISU, MEDIA MASSA DAN NEW MEDIA

A. Public Relations

Di Indonesia praktik *public relations* seringkali diadaptasi menjadi hubungan masyarakat. Menurut etimologi, kata *public* dan kata *relations* membentuk istilah *public relations*.³³ Komponen kunci *public relations* adalah sekelompok orang yang berkerja sebagai juru bicara.³⁴ *Public relations* dan publik saling berhubungan. Publik adalah target spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi. *Public relations* memiliki dua jenis publik yakni publik internal dan publik eksternal. Publik internal mencakup semua karyawan dalam suatu organisasi. Sedangkan publik eksternal mencakup sekelompok orang yang terlibat langsung dalam aktivitas sebagai fungsi pelaksanaan *public relations*.³⁵

Publik internal mencakup aktivitas *public relations* yang ditujukan pada kelompok di dalam organisasi. *Public relations* menangani publik internal dengan berusaha mengenali, mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan kesan negatif pada masyarakat. *Public relations* harus mampu memahami apa yang terjadi dalam suatu organisasi. Sedangkan publik eksternal mencakup sekelompok harus mampu memahami apa yang terjadi

³³ Budiman Purba, "Pengaruh *Public Relations* terhadap Peningkatan Pengguna Jasa di Bandara Internasional Kualanamu Kab. Deli Serdang", (Medan: *Network Media* Vol. 1, No. 1, Februari, 2018), hlm. 3.

³⁴ Rahmat Kriyantono, *Public Relations Writing: Proses Produksi Media PR Dan Publisitas Media*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5.

³⁵ Soleh Soemirat, *Dasar-Dasar Public Relations*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 15.

dalam suatu organisasi.³⁶ Dengan kelompok tersebut, *Public relations* harus mempromosikan strategi komunikasi yang efektif karena dapat menunjukkan keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Menurut Frank Jefkins, *public relations* adalah strategi komunikasi yang digunakan untuk memajukan tujuan dan reputasi suatu organisasi, baik secara eksternal maupun internal. Menurut John E. Marston, *public relations* adalah strategi persuasif dan komunikasi strategis yang digunakan untuk mempengaruhi publik yang signifikan. Menurut Cutlip & Center, *public relations* merupakan kegiatan manajemen yang mendorong dan memelihara hubungan positif antara organisasi dan pemangku kepentingannya, yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan organisasi.³⁷ Jadi *public relations* merupakan sebuah komunikasi terencana dan tolak ukur organisasi yang berfungsi untuk membangun dan memperkuat persepsi publik yang positif. *Public relations* dan reputasi sangat erat kaitannya untuk melindungi dari publisitas negatif dan untuk memperkuat reputasi positif.

Menurut Rosady fungsi *public relations* antara lain; menciptakan komunikasi dua arah, melayani publik, membuat rekomendasi kepada pemimpin organisasi untuk kepentingan publik, mengintegrasikan hubungan yang harmonis antara organisasi dan publik baik internal maupun eksternal, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan tindakan, serta berupaya mengintegrasikan sikap dan tindakan organisasi. Empat tugas dasar yang harus dilakukan *public relations* sebagai berikut;

³⁶ Elvinaro Andrianto, *Handbook of Public Relations Pengantar Komprehensif*, (Bandung: Simobiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 115.

³⁷ Soemirat, hlm. 13-14.

1. *Communicator*, yaitu sarana komunikasi utama organisasi, *public relations* menggunakan sarana media dan masyarakat umum.
 2. *Relationship*, merupakan alat utama dalam *public relations* untuk menciptakan hubungan yang positif antara organisasi dan publik.
 3. *Backup management* yaitu melaksanakan dukungan manajerial atau mendukung kegiatan lain untuk mengembangkan tujuan bersama dalam kerangka tujuan utama organisasi.
- A. *Good image maker* yaitu menciptakan citra organisasi dan opini publik yang positif menjadi tujuan utama kegiatan *public relations* dalam melaksanakan manajemen.³⁸

B. Media Monitoring

Pengelolaan informasi menjadi faktor terpenting bagi organisasi. Strategi pengelolaan informasi dapat digunakan oleh organisasi untuk menentukan tujuan dan keputusan. Pengelolaan informasi dapat dilakukan melalui media monitoring. Menurut William J. Comcowih, media monitoring adalah proses membaca, mencatat, atau memperhatikan konten media secara menyeluruh, diikuti dengan mengidentifikasi dan menganalisis konten yang mengandung kata kunci atau informasi yang relevan.³⁹

Media monitoring digunakan untuk mengungkap perkembangan isu yang berpotensi memicu krisis. Media monitoring tidak hanya penting untuk identifikasi masalah tahap awal, tetapi juga berguna untuk manajemen krisis.

³⁸ Wayan Supada, "Peran *Public Relations* dalam Membangun Pencitraan Positif Organisasi", (Buleleng: *Communicare*, Vol. 1, No. 1, Juni, 2020), hlm. 95.

³⁹ Ade Irma Stefi Ulil Amri, "The Use of Big Data to Determine the Government's Communication Strategy," (Dubai: *KnE Social Sciences*, Juli, 2021), hlm. 279.

Media monitoring dapat menjadi alat yang berguna untuk manajemen isu yang baik. Sebagian besar perusahaan, lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba menggunakan media monitoring untuk melacak penyebutan organisasi mereka di artikel berita.⁴⁰

Media monitoring bagi praktisi *public relations* merupakan bagian integral. *Public relations* memonitor konten baik melalui media konvensional maupun media digital. Munculnya media digital, media monitoring terbagi menjadi beberapa jenis media. *public relations* memonitor media tradisional, media elektronik, media online dan media sosial. Proses media monitoring dimulai dengan profil pencarian dan kata kunci. Profil pencarian berisi mengenai informasi media yang dipantau, jenis artikel dan penyebutan yang tertulis, tanggal dan waktu publikasi serta halaman artikel. Kata kunci adalah kata tau frasa seperti nama organisasi, afiliasi atau merek harus ada dalam teks artikel.⁴¹

Media monitoring adalah komponen penting dari proses tata kelola organisasi. Penggunaan media monitoring sering dilakukan oleh konsultan hubungan masyarakat. *Public relations* harus memiliki pengetahuan tentang alat analisis kelompok sasaran survei. Oleh karena itu, spesialis *public relations* dapat menganalisis sentimen dan hasil media. *Public Issues Monitoring* dan *Media Content Analysis* adalah dua jenis analisis yang

⁴⁰ Isyraqi Khairy Siregar and Kurniati Putri Haeirina, "Komunikasi Krisis PT. Jouska Finansial Indonesia Dalam Pemulihan Citra Perusahaan", (Jakarta: *Jurnal Pustaka Komunikasi*, Vol. 4, No. 1, Maret, 2021), hlm. 5.

⁴¹ William J Comcowich, "Media Monitoring: The Complete Guide," *Cyber Alert Inc, White Paper*, 2010, hlm. 14.

dihasilkan oleh proses media monitoring.⁴² *Public Issues Monitoring* adalah komponen dari proses media monitoring yang menggunakan penelusuran *headline* berita. Sedangkan *Media Content Analysis* adalah komponen dari proses media monitoring berdasarkan isi berita.⁴³ Beberapa organisasi menerapkan media monitoring untuk melacak keberhasilan rilis berita, mempelajari lebih lanjut tentang pesaing dan isu yang relevan dengan organisasi, membandingkan kinerja dengan pesaing, mengelola reputasi, menemukan peluang dan tujuan lainnya.

Tahapan-tahapan media monitoring yang dilakukan oleh praktiksi *public relations* ;

1. Mencari atau mengumpulkan berita di berbagai media.
2. Mengklasifikasikan atau memilih dan memilah berita yang berkaitan dengan pencarian kata kunci yang bertujuan untuk menganalisis konten yang dipantau.
3. Mengkliping atau mengumpulkan berita di media yang berkaitan dengan organisasi.
4. *Executive summary* merupakan pokok berita dari beragam media yang disusun berdasarkan mekanismenya meliputi pemerataan berita dan pencatatan sumber, tanggal dan halaman media.
5. *Tone* dikategorikan menjadi tiga jenis;

⁴² Dita Kusumasari dan Onny Rafizan, "Studi Implementasi Sistem Big Data untuk Mendukung Kebijakan Komunikasi dan Informatika", (Jakarta: *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 8, No. 2, Desember, 2017), hlm. 83–85.

⁴³ Amri, hlm 297.

- a. Positif merupakan pemberitaan yang memiliki arti pemberitaan yang baik bagi organisasi.
 - b. Netral merupakan pemberitaan yang hanya bersifat informatif.
 - c. Negatif merupakan pemberitaan mengenai terjadinya suatu penyimpangan dan kegagalan organisasi.
6. Tabulasi merupakan pembuatan tabel-tabel yang berisi data analisis pemberitaan.
7. *Resume and report* merupakan sebuah ringkasan dan laporan kegiatan media monitoring.⁴⁴

C. Manajemen Isu

Harrison mendefinisikan isu sebagai banyak kejadian publik yang mungkin berdampak pada operasi atau kepentingan organisasi. Isu dapat menjadi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Menurut *The Issue Management Council*, isu muncul ketika ada ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan publik dengan kebijakan, praktik, barang atau komitmen suatu organisasi kepada masyarakat umum. Kegiatan organisasi akan terpengaruh jika isu terus berlanjut. Tujuan dari manajemen isu adalah untuk mempersempit atau menghilangkan kesenjangan. Jika tidak, isu akan menyebabkan perselisihan antara organisasi dengan publiknya.⁴⁵ Dapat

⁴⁴ M Ismail Alif et al., "Analisis Isi dalam Kegiatan Media Monitoring Program Nasional PNPM Mandiri Pedesaan yang dipublikasikan melalui Media Daring," (Pekanbaru: *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 5, No. 1, Februari, 2020), hlm. 206–209.

⁴⁵ Rachmat Kriyantono, *Public Relations & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relation, Etnografi Kritis & Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 151-152.

dikatakan bahwa suatu isu adalah akar dari potensi konflik antara organisasi dan publiknya.

Isu dapat muncul tiba-tiba dan menyebabkan hasil yang tidak terduga, tetapi isu dapat diantisipasi. Secara umum, organisasi cukup menyadari situasi yang mungkin berdampak pada kegiatannya. Semuanya bergantung pada seberapa baik *public relations* dapat mengawasi lingkungannya. *Public relations* dapat melacak sentimen publik tentang peristiwa sosial yang mungkin berdampak pada organisasi dengan memantau lingkungan secara rutin. Jenis monitoring tersebut dikenal sebagai peringatan dini, biasanya mencakup mengikuti opini publik, memotong artikel berita dan mengadakan dialog publik.⁴⁶ Dengan cara ini, diharapkan organisasi akan dapat memprediksi kejadian di masa depan.

Menurut Howard Chase, manajemen isu adalah teknik yang dapat digunakan organisasi untuk mengenali, mengevaluasi dan menangani isu yang muncul dan mengambil tindakan yang tepat sebelum menyebar luas. Menurut Tucker dan Broom, manajemen isu adalah proses membantu mengurangi risiko, menghasilkan peluang, dan mengelola reputasi sebagai aset organisasi. Manajemen isu memiliki kemampuan untuk memprediksi tren dan peristiwa masa depan yang dapat berdampak pada bagaimana organisasi berjalan.⁴⁷ Ada dua komponen dalam manajemen isu yaitu mendeteksi dini

⁴⁶ Kriyantono, *Public Relations & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relation, Etnografi Kritis & Kualitatif*, hlm. 153.

⁴⁷ Michael Regester dan Judy Larkin, *Risk Issues and Crisis Management in Public Relations: A Casebook of Best Practice*, (United Kingdom: Kogan Page Publishers, 2008), hlm. 41-44.

isu yang mungkin merugikan organisasi dan tindakan terencana yang dimaksudkan untuk mengurangi atau mengintensifkan dampak dari isu.

Dengan menyadari kemungkinan isu, organisasi dapat merencanakan tindakan terbaik untuk meningkatkan citranya. *Public relations* mampu mengidentifikasi dan memahami topik-topik yang dianggap penting oleh publik. Kepentingan publik dan masalah kritis dianggap mewakili keadaan publik yang termuat dalam pemberitaan media massa. *Public relations* juga dapat mengembangkan program berhubungan dengan kemungkinan isu tersebut.

Isu yang tidak terkelola berpotensi berkembang menjadi krisis. Tanggungjawab utama praktisi *public relations* adalah membantu manajemen dalam berupaya mengelola isu untuk mencegah krisis. Organisasi akan memberikan *public relations* peran penting dengan memasukkannya ke dalam tim manajemen isu. Tim ini berkomitmen untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengidentifikasi isu-isu sosial, politik, agama, ekonomi, dan lingkungan yang berpotensi berdampak negatif terhadap aktivitas organisasi. *Public relations* dapat diandalkan untuk menangani isu-isu, memberi pengaruh yang lebih besar atas proses pengambilan keputusan.⁴⁸

⁴⁸ Kriyantono, *Public Relations & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relation, Etnografi Kritis & Kualitatif*, hlm. 153.

D. Media Massa

Media adalah saluran untuk mengkomunikasikan gagasan dari komunikator kepada komunikan.⁴⁹ Bungin mendefinisikan media massa sebagai metode komunikasi dan informasi yang menyebarluaskan informasi secara sistematis dan dapat diakses secara umum oleh masyarakat luas.⁵⁰ Cangara mendeskripsikan bahwa media massa adalah cara komunikator untuk menjangkau khalayak dengan pesan melalui media seperti surat kabar, radio, televisi dan film.⁵¹ Jadi media massa ini sebuah alat komunikasi yang mampu menyebarkan pesan komunikator kepada khalayak umum yang bersifat satu arah.

Istilah media massa diilustrasikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam skala lebih besar. Tujuan utama dari media massa adalah untuk memberikan hiburan, informasi dan pendidikan. Menurut Elvinaro, lima jenis fungsi media massa adalah pengawasan (*surveillance*), penafsiran (*interpretation*), pertalian (*linkage*), penyebaran nilai-nilai (*transmission of value*) dan hiburan (*entertainment*).⁵² Media massa memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi apapun. Media massa harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang berbagai isu publik.

Menurut Hafied Cangara media massa memiliki karakteristik tersendiri yaitu;

⁴⁹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 123.

⁵⁰ Bungin Burhan, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 72.

⁵¹ Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, hlm. 126.

⁵² Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 14-17.

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengontrol media mulai dari pengumpulan, pengelolaan serta sajian informasi.
2. Bersifat satu arah, artinya hanya komunikan yang mengirimkan informasi tidak ada penerimaan informasi..
3. Meluas dan serempak, artinya kecepatan menjadi hal utama dalam menyampaikan pesan kepada khalayak guna menjangkau jarak, waktu dan simultan.
4. Bersifat terbuka, artinya siapa pun dapat mengirim dan menerima pesan, tanpa memandang usia, jenis kelamin atau ras.⁵³

Media massa telah berkembang menjadi pusat untuk menyebarluaskan berbagai informasi tentang peristiwa di masyarakat. Keadaan sosial yang penting bagi khalayak harus diungkapkan, dipahami dan didukung oleh media massa. Media cetak dan media elektronik adalah dua kategori dari media massa. Surat kabar, majalah, buku dan bahan cetak lainnya termasuk sebagai media cetak. Radio, televisi dan film adalah tiga bentuk utama dari media elektronik.⁵⁴

Media cetak merupakan media yang berbentuk cetakan dalam kertas. Johannes Gutenberg pertama kali menemukan media cetak pada tahun 1455. Menurut Eric Barnow, semua benda yang dicetak dan disampaikan kepada khalayak disebut media cetak. Bentuk media cetak seperti majalah, surat kabar atau bentuk lainnya yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan

⁵³ Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, hlm.126-127.

⁵⁴ Irene Silvia et al., *Manajemen Media Massa* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 49.

khalayak umum.⁵⁵ Bentuk paling awal dari media massa adalah media cetak, tetapi hanya orang melek huruf yang dapat menggunakannya. Salah satu kelebihanannya dapat memberikan informasi yang valid. Surat kabar dan media cetak lainnya dapat dipisahkan berdasarkan frekuensi terbitnya (harian dan mingguan), ukuran (ukuran plano dan tabloid), dan jenis penerbitan (umum dan khusus).⁵⁶

Media elektronik adalah bentuk komunikasi yang mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis media yang disebut media elektronik menggunakan suara atau visual untuk mengirimkan informasi. Informasi publik didistribusikan dan dikomunikasikan melalui media elektronik. Media audio dan media audio-video adalah dua kategori media elektronik.⁵⁷

Radio merupakan salah satu contoh media audio yang menggunakan indera pendengaran. Kekuatan radio terletak pada suara karena suara menjadi modal utama dari radio untuk menyampaikan pesan kepada khalayak.⁵⁸ Sedangkan media audio-video adalah media yang melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Media audio-video memiliki daya tarik baik dari segi audio dan visual yang mampu mempengaruhi khalayak. Media audio visual dapat menampilkan gambar yang sesuai dengan apa yang diucapkan

⁵⁵ I Made Suyasa and I Nyoman Sedana, "Mempertahankan Eksistensi Media Cetak Di Tengah Gempuran Media Online", (Baturaja: *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, Juni, 2020), hlm. 58-59.

⁵⁶ Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, hlm. 127-128.

⁵⁷ Silvia et al., *Manajemen Media Massa*, hlm.45.

⁵⁸ Morissan, *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*, (Prenada Media, 2018), hlm. 4-6.

melalui suara. Dua bentuk media utama yang membentuk media audiovisual ini adalah televisi dan film.⁵⁹

E. New Media

Fenomena aktual yang dihadapi oleh khalayak adalah perkembangan dan pertumbuhan media yang menjadi *new media* (media baru). Karakteristik *new media* yang konvergen atau tidak mengenal ruang dan waktu. Konvergensi dipandang sebagai pencampuran media lama dengan *new media* berbasis komputer dan internet. *Platform new media* disebut sebagai media karena menggabungkan konten audio, visual, dan tekstual dengan fungsionalitas interaktif.⁶⁰

Flew mendefinisikan *new media* sebagai jenis penggabungan dari jaringan komputer, teknologi informasi, jaringan komunikasi, konten media, dan informasi digital. Sedangkan, Power dan Littlejohn menyebut *new media* sebagai fase terbaru dari teknologi komunikasi yang interaktif. Konsep *new media* berpusat pada penggunaan teknologi khususnya internet yang menyebabkan perubahan sosial.⁶¹ Jadi *new media* menjadi sebuah teknologi penghubung media digital yang memanfaatkan sistem komputerisasi yang terhubung jaringan.

Keberadaan media baru secara signifikan mengubah cara orang berkomunikasi. Jaringan internet berfungsi sebagai saluran interaktif untuk

⁵⁹ Tomi Hendra, "Media Massa dalam Komunikasi Pembangunan," (Padangsidimpun: *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, Vol. 1, No. 2, Juni, 2019), hlm. 142–143.

⁶⁰ Hermin Indah Wahyuni, *Kebijakan Media Baru Di Indonesia (Harapan Dinamika Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia)*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), hlm. 1.

⁶¹ Fajar Junaedi, *Komunikasi 2.0 Teoritisasi Dan Implikasi*, (Yogyakarta: *Aspikom*, 2011), hlm. 53.

komunikasi dan mendapatkan informasi. *New media* menjadi dominan di masyarakat karena media konvensional akan berpartisipasi dalam jaringan *cyberspace*. Media massa mengalami pergeseran bentuk yang berbeda dari media tradisional ke internet yang menjadi *platform* bagi media massa. Jenis media massa yang telah transformasi menjadi *new media* dapat dibagi ke dalam kategori berikut;

1. Jurnalisme *online*

Gaya alternatif diciptakan melalui jurnalisme *online*. Metode dan praktik jurnalistik tradisional telah berkembang sebagai hasil dari jurnalisme *online*.

2. Televisi digital

Televisi yang mentransmisikan sinyal gambar, suara, dan data menggunakan ide digital dan teknik kompresi dikenal sebagai televisi digital. Televisi digital berasal dari sistem siaran analog yang diubah menjadi sinyal digital. Televisi digital adalah perangkat untuk merekam siaran di televisi digital.

3. Radio *streaming*

Radio dapat mengakses siaran radio melalui saluran media komunikasi yang mendukung. Seperti *streaming* atau internet, radio *streaming* lebih mudah diakses dan memiliki kualitas suara yang lebih baik. Tidak hanya untuk didengarkan, siaran konten juga dapat disimpan berkat kemajuan teknologi. *Podcast* adalah file audio atau program yang diunduh ke komputer atau diputar di media *portabel* lain untuk disebarluaskan.

Penyajian siaran radio dengan teknologi internet dapat menampilkan *website* untuk mendapatkan informasi lain. Tampilan *website* dibuat dengan konten untuk memberikan nilai tambahan.⁶²



⁶² Gushevinalti Gushevinalti, Panji Suminar, dan Heri Sunaryanto, “Transformasi Karakteristik Komunikasi Di Era Konvergensi Media,” Jakarta: *Bricolage Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, Vol. 6, No. 1, Desember, 2020), hlm. 93–96.

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (DISKOMINFO) KABUPATEN TEGAL

A. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tegal

1. Profil Diskominfo Kabupaten Tegal

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal membentuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tegal. Diskominfo Kabupaten Tegal merupakan Dinas Tipe B yang menangani urusan pemerintahan untuk bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Tanggung jawab utama Diskominfo adalah mendukung Bupati dalam mengatur kegiatan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Diskominfo Kabupaten Tegal melakukan tugas-tugas berikut untuk mencapai tujuan utama ini;

- a. Perumusan regulasi teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
- b. Penyelenggaraan urusan dan layanan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

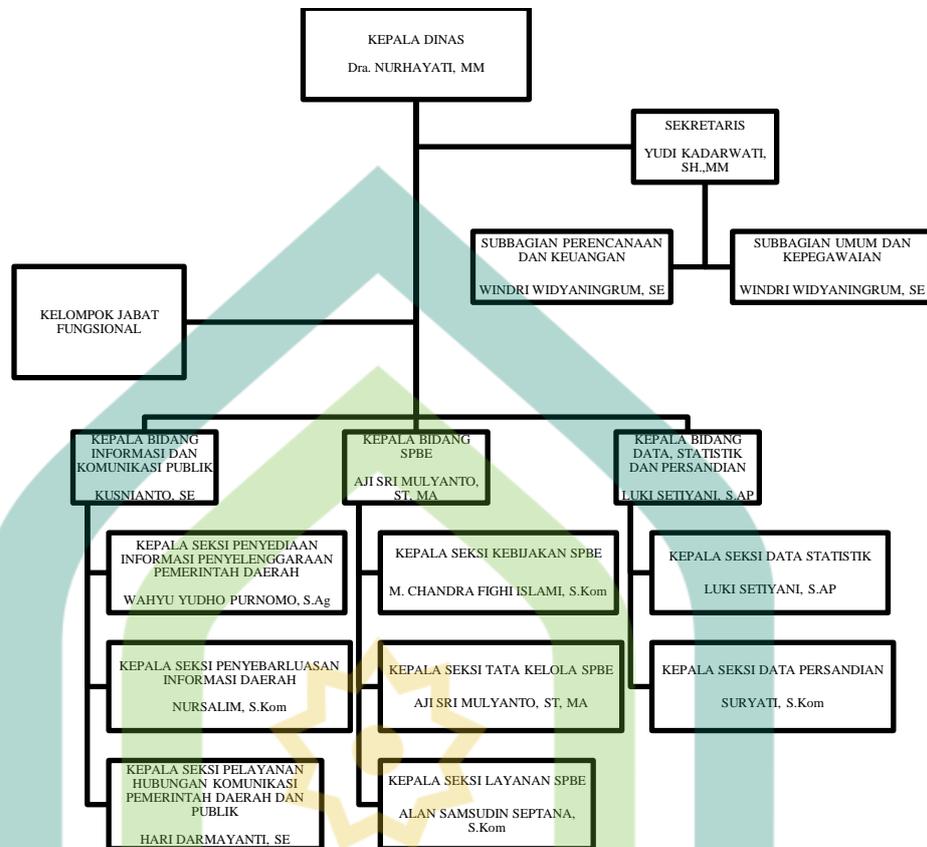
- c. Pembinaan arah tugas dan pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.
- d. Pengelolaan urusan administrasi Dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang termasuk dalam bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

2. Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Tegal

Visi, misi, maksud dan tujuan Diskominfo Kabupaten Tegal dikaji bersama dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal adalah terwujudnya layanan informasi yang akurat. Dalam rangka penjabaran visi tersebut maka disusunlah misi untuk terwujudnya layanan informasi yang akurat dengan rincian sebagai berikut;

- a. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.
- b. Mengembangkan sistem layanan informasi.
- c. Meningkatkan sinergitas dengan sumber informasi.

3. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi di Diskominfo Kabupaten Tegal diantaranya:

a. Kepala Diskominfo

Kepala Diskominfo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Diskominfo mempunyai fungsi:

- 1) Penetapan rencana kerja.
- 2) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- 3) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- 4) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- 5) Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- 7) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
- 8) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan.
- 2) Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan dinas.
- 3) Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dinas.
- 4) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas.
- 5) Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis dinas.
- 6) Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas dinas.
- 7) Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, aset dan umum dinas.
- 8) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

c. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
- 2) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan dinas.

- 3) Penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dinas.
- 4) Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja dinas.
- 5) Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dinas.
- 6) Pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang perencanaan, keuangan dan penganggaran.
- 7) Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi.
- 8) Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- 9) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
- 2) Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.
- 3) Pengelolaan urusan ketatausahaan.

- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 5) Pengelolaan dan penatausahaan aset dinas.
- 6) Pengelolaan kearsipan dinas.
- 7) Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.
- 8) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

e. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik.
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik.
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah,

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik.

4) Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik.

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik.

6) Pelaksanaan administrasi di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik.

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik.

f. Kepala Seksi Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kepala Seksi Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang informasi dan komunikasi publik dalam melakukan kebijakan, program dan

kegiatan di bidang penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala seksi penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

g. Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

h. Kepala Seksi Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintah Daerah dan Publik

Kepala Seksi Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintahan Pemerintah Daerah dan Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pelayanan hubungan komunikasi pemerintahan pemerintah daerah dan publik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas kepala bidang informasi dan komunikasi publik dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Pelayanan Hubungan Komunikasi Pemerintahan Pemerintah Daerah dan Publik.

i. Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan di bidang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE dan layanan SPBE.

- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE dan layanan SPBE.
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE dan layanan SPBE.
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE dan layanan SPBE.
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE dan layanan SPBE.
- 6) Pelaksanaan administrasi di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE dan layanan SPBE.
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE dan layanan SPBE.

j. Kepala Seksi Kebijakan SPBE

Kepala Seksi Kebijakan SPBE mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang SPBE dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang kebijakan SPBE. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Kebijakan Internal SPBE mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas kepala bidang SPBE dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Kebijakan SPBE.

k. Kepala Seksi Tata Kelola SPBE

Kepala Seksi Tata Kelola SPBE mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang SPBE dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang tata kelola SPBE. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Tata Kelola SPBE mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang SPBE dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata kelola SPBE.

l. Kepala Seksi Layanan SPBE

Kepala Seksi Layanan SPBE mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang SPBE dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang layanan SPBE. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Layanan SPBE mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas kepala bidang SPBE dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Layanan SPBE.

m. Kepala Bidang Data, Statistik dan Persandian

Kepala Bidang Data, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan di bidang data statistik dan persandian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Data, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

- 1.) Perumusan kebijakan di bidang data statistik dan persandian.
- 2.) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang data statistik dan persandian.
- 3.) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang data, statistik dan persandian.
- 4.) Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang data, statistik dan persandian.
- 5.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang data, statistik dan persandian.
- 6.) Pelaksanaan administrasi di bidang data, statistik dan persandian.
- 7.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang data, statistik dan persandian.

n. Kepala Seksi Data Statistik

Kepala Seksi Data Statistik mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Data, Statistik dan Persandian dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang data statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Data Statistik mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Data, Statistik dan Persandian dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Data Statistik.

o. Kepala Seksi Persandian

Kepala Seksi Persandian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Statistik dan Persandian dalam melakukan kebijakan, program dan kegiatan di bidang persandian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Persandian mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Data, Statistik dan Persandian dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Persandian.

p. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan wewenang, tugas pokok dan fungsi dinas sesuai uraian tugas berdasarkan pedoman angka kredit jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B. Hasil Penelitian

Metode pengumpulan data di lapangan melalui wawancara mendalam dilakukan dengan informan secara langsung untuk memberikan temuan atau hasil penelitian. Teknik observasi non partisipan digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan. Data yang telah didapatkan menjelaskan hasil penelitian terkait strategi monitoring berita keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada masa pandemi COVID-

19 dan strategi pengelolaan isu keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada masa pandemi COVID-19.

Penelitian ini melibatkan pegawai pranata humas Diskominfo Kabupaten Tegal yakni Purwandi dan Kusnianto. Informan bernama Purwandi merupakan pegawai Diskominfo Kabupaten Tegal di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP). Purwandi bertugas dalam penyediaan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui monitoring opini dan aspirasi publik dan memantau isu publik melalui media *online*. Informan Kusnianto merupakan Kepala Bidang IKP. Kusnianto bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan data dilapangan sebagai berikut:

1. Strategi Monitoring Berita Keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi COVID-19

Bidang IKP, Diskominfo Kabupaten Tegal sebagai *government public relations* di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memiliki tiga sub urusan diantaranya penyediaan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan hubungan komunikasi Pemerintah Daerah dan publik. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki tiga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam hal penyediaan informasi.

Pertama, memantau opini dan aspirasi publik melalui media elektronik dan tradisional serta melalui media massa dan media sosial. Pemantauan ini dibagi menjadi dua kategori yaitu pengumpulan dan analisis informasi dari radio, media cetak, media *online* serta media sosial dan memantau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi Pengaduan *Online* Rakyat (LAPOR) serta Layanan Nomer Tunggal Panggilan Darurat (NTPD) 112/ *Call Center* 112. Kedua, mengatur dan merencanakan isi media komunikasi publik baik berupa *live streaming*, konten videotron, konten media sosial, penerbitan majalah dan konten *talkshow*. Ketiga, melakukan monitoring informasi dan menetapkan prioritas komunikasi untuk pemerintah daerah.

Menurut tupoksi bidang IKP, Diskominfo memiliki tugas untuk memonitoring informasi cakupan wilayah Kabupaten Tegal. Sehingga IKP melakukan kegiatan media monitoring berita di media *online*. Kegiatan media monitoring dilakukan sebagai acuan untuk mengontrol pemberitaan di media *online*. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengelola reputasi, pencegahan isu serta menentukan kebijakan. Kegiatan media monitoring juga untuk memetakan kategori berita dan analisis berita negatif.

“Kegiatan media monitoring ini merupakan tugas Diskominfo, untuk dinas lain tidak melakukan media monitoring, kegiatan ini sebagai kontrol pemberitaan khususnya media *online* sehingga pemerintah bisa menindaklanjuti apabila tidak sesuai dengan program pemerintah.”⁶³

⁶³ Purwandi, Pranata Humas Diskominfo Kabupaten Tegal, Wawancara Pribadi, Tegal, 17 April 2023.

Kusnianto juga menegaskan media monitoring merupakan langkah awal Diskominfo Kabupaten Tegal. Media monitoring berfungsi memantau serta mengelola pemberitaan. Peranan media monitoring mempermudah pemantauan keadaan masyarakat Kabupaten Tegal. Diskominfo Kabupaten Tegal sebagai pusat pelaksanaan komunikasi dan informatika tingkat daerah memaksimalkan kegiatan monitoring untuk melaksanakan kebijakan berkaitan dengan informasi dan komunikasi publik.

“Masa-masa pandemi media monitoring berperan penting. Melalui media monitoring apalagi di media berita, Kominfo lebih mudah untuk memantau keadaan yang terjadi di masyarakat di media.”⁶⁴

Jenis media monitoring yang dilakukan dengan menggunakan *media clipping* dan *media content analysis* atau analisis berita. *Media clipping* yakni mengumpulkan sumber data berita. Data yang dikumpulkan berupa judul berita, tanggal terbit, sumber berita serta *link* berita tersebut. Kemudian berita tersebut dianalisis untuk menentukan kategori dan respon atau sentiment berita. Sedangkan analisis berita yakni kegiatan menganalisis berita negatif yang berisi sumber berita, tanggal terbit, isi berita atau poin berita, narasumber yang berbicara, respon atau sentimen, kategori berita dan rekomendasi tindak lanjut berita tersebut.

“Kami hanya memantau enam portal berita ada tribun jateng, radar tegal, ayo tegal, pantura post dan sm pantura, kami

⁶⁴ Kusnianto, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Wawancara Pribadi, Tegal, 22 Juni 2023.

menggunakan portal tersebut karena ya itu media lokal kita.”⁶⁵

Media monitoring yang berarti melakukan pemantauan terhadap media. IKP melakukan monitoring pada media lokal atau media yang beroperasi di daerah Kabupaten Tegal yang berjenis media *online*. Terdapat enam media *online* yang dijadikan objek dalam kegiatan media monitoring diantaranya Tribun Jateng, Radar Tegal, Kabar Tegal, Ayo Tegal, Pantura Post serta Suara Merdeka Pantura. IKP memilih media tersebut karena berita yang terbit merupakan informasi di lingkup Kabupaten Tegal.

Setelah menentukan media sebagai objek kegiatan media monitoring. IKP juga telah menentukan kata kunci atau *top newstrend* untuk menentukan kategori berita yang telah dipublikasikan oleh media. Terdapat lima *top newstrend* yang digunakan dalam media monitoring yakni kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal, keadaan umum Kabupaten Tegal, kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal, fasilitas umum Pemerintah Kabupaten Tegal dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal. Diskominfo menggunakan lima *top newstrend* karena kegiatan pemerintah hanya berkaitan dengan lima hal tersebut.

“Untuk penentuan parameter *top newstrend* dari Diskominfo masih menggunakan parameter secara global. Parameter yang bersifat global ini digunakan agar lebih mudah untuk mengklasifikasikan berita, karena Diskominfo melakukan semua monitoring pemberitaan yang mencakup wilayah

⁶⁵ Purwandi, Pranata Humas Diskominfo Kabupaten Tegal, Wawancara Pribadi, Tegal, 17 April 2023.

Kabupaten Tegal baik dari sisi pemerintahan ataupun keadaan masyarakat.”⁶⁶

No	Top Newstrend	Kategori
1.	Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal	Berita yang berisi kegiatan serimonial
2.	Keadaan Umum Kabupaten Tegal	Berita tentang kondisi baik masyarakat maupun kondisi Kabupaten Tegal sifatnya secara umum
3.	Kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal	Berita tentang pencapaian pemerintah baik secara kualitas maupun kuantitas
4.	Fasilitas Umum Pemerintah Kabupaten Tegal	Berita yang menginformasikan tentang kondisi fasilitas umum di Kabupaten Tegal
5.	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal	Berita terkait sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah yang ada dasarnya

Tabel 3.1 Deskripsi Kategori Berita *Top Newstrend*

Berita memiliki nada berita atau dikenal *tone* berita. IKP juga menentukan *tone* berita yang digunakan untuk menganalisa berita. IKP mengenalnya dengan sebutan respon. *Tone* atau respon berita merupakan

⁶⁶ Kusnianto, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Wawancara Pribadi, Tegal, 22 Juni 2023.

sebuah penilaian yang dilakukan setelah membaca keseluruhan isi berita. *Tone* atau respon berita terbagi menjadi tiga yaitu positif, netral dan negatif. Berikut indikator *tone* atau respon berita yang digunakan oleh IKP Diskominfo Kabupaten Tegal

No	Tone atau Respon Berita	Deskripsi
1.	Positif	Berita yang memiliki pencapaian diatas target
2.	Netral	Berita tidak memiliki efek apapun biasanya bersifat informatif, netral dan umum
3.	Negatif	Berita yang memiliki potensi atau implikasi negatif kepada pemerintah

Tabel 3.2 Deskripsi *Tone* atau Respon Berita

IKP melaksanakan kegiatan media monitoring setiap hari. Setiap harinya pegawai IKP memonitoring berita yang terbit pada media yang telah ditentukan. Selanjutnya pegawai IKP membaca keseluruhan berita tersebut untuk menentukan berita itu masuk dalam kategori berita yang telah di tentukan di *top newstrend*. Setelah itu pegawai IKP melakukan penilaian terhadap berita tersebut yang telah ditentukan di *tone* atau respon berita. Berita yang telah dimonitor kemudian di input ke sebuah format *media clipping* untuk arsip laporan kepada pimpinan.

Sedangkan untuk analisis berita, IKP hanya melakukan analisis berita lebih spesifik ke berita negatif. Karena berita negatif harus segera direspon agar tidak menjadi isu yang terkanalisasi serta harus di *counter* dengan baik. Dalam tahapan analisis berita dilakukan *breakdown* dari hasil media monitoring. Lalu diberi rekomendasi tindak lanjut dari publikasi berita negatif kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan berita tersebut.

“Untuk penanganan berita positif dan negatif kami tidak melakukan namun tetap dilaporkan kepada Kabid IKP dan Kadis, sedangkan berita negatif dari kadis akan melaporkan ke sekda dan di *follow up* ke bupati. Setiap kali ada berita negatif, hari itu juga Kadis akan melaporkan ke Sekda.”⁶⁷

Hasil dari media monitoring khususnya berita positif dan netral dilaporkan dari pranata humas ke Kepala Bidang IKP kemudian di laporkan kepada Kepala Diskominfo. Sedangkan media monitoring berita negatif di-*breakdown* menjadi analisis berita. Dalam analisis berita terdapat rekomendasi tindak lanjut dari pranata humas dilaporkan kepada Kepala Bidang IKP kemudian dilaporkan pada Kepala Diskominfo, kemudian Kepala Diskominfo melaporkan ke Sekretaris Daerah (Sekda) serta Sekda melakukan *follow up* kepada Bupati. Dari Bupati akan menindaklanjuti analisis berita negatif kepada OPD yang berkaitan untuk memberikan penjelasan terkait informasi yang telah dipublikasikan.

⁶⁷ Purwandi, Pranata Humas Diskominfo Kabupaten Tegal, Wawancara Pribadi, Tegal, 17 April 2023.

2. Strategi Pengelolaan Isu Keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada Masa COVID-19

Public relations erat berkaitan dengan pengelolaan isu. *Government public relations* Kabupaten Tegal yang dijalankan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal juga melakukan pengelolaan isu cakupan Pemda Kabupaten Tegal. Bidang IKP Diskominfo Kabupaten Tegal selain melakukan media monitoring juga melakukan pemantauan serta pengelolaan isu publik di media. Untuk pengelolaan isu dalam berita dilakukan dengan pemantauan, mengumpulkan dan menganalisa informasi di media *online*. Melalui pemantauan berita dapat diidentifikasi berita-berita yang berpotensi menjadi isu.

“Salah satu tugas IKP itu pemantauan informasi untuk mengetahui pemberitaan-pemberitaan negatif di Kabupaten Tegal. Apalagi pada masa pandemi, semua orang mengetahui informasi dari media. Bahkan banyak pemberitaan yang tidak sesuai sampai mempengaruhi persepsi masyarakat, dari media monitoring ini bisa diketahui apa yang harus dilakukan Pemda untuk menangani permasalahan yang terjadi”⁶⁸

Purwandi juga menjelaskan bahwa media monitoring berita merupakan bagian awal dari pengelolaan isu. Berita yang telah melalui media monitoring terutama berita yang dinilai negatif harus segera diidentifikasi dan dianalisis. Diskominfo Kabupaten Tegal mengelola isu bersumber dari media monitoring berita yang bersentimen negatif. Berita negatif tersebut di-*breakdown* menggunakan jenis analisis berita untuk mengidentifikasi dan menganalisis berita tersebut. Setelah proses analisis

⁶⁸ Kusnianto, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Wawancara Pribadi, Tegal, 22 Juni 2023.

berita, pranata humas memberikan tindaklanjut untuk merespon berita tersebut.

“Diskominfo mengidentifikasi melalui media monitoring lalu berita yang bersifat negatif buat analisis beritanya dan memberikan rekomendasi tindaklanjut dalam merespon berita tersebut. Setelah dibuat baru dilaporkan kepada Kepala Diskominfo lalu dilaporkan ke sekda ditembusi ke Bupati”⁶⁹

Intruksi Bupati terkait PPKM Darurat Jawa-Bali pada masa pandemi COVID-19 terdapat kebijakan penutupan sementara tempat ibadah. Media *online* pantura.suaramerdeka.com bahkan mempublikasikan berita berjudul “MUI Kabupaten Tegal Minta Tempat Ibadah Jangan Ditutup Total Saat PPKM Darurat”. Berita tersebut dinilai negatif karena melalui pemberitaan tersebut menimbulkan persepsi kepada masyarakat bahwa Pemda Kabupaten Tegal melalui keputusan PPKM Darurat melarang masyarakat tidak boleh beribadah di tempat ibadah. Berita tersebut menarasikan bahwa Tubagus Fahmi, Wakil MUI Kabupaten Tegal meminta untuk tempat ibadah jangan ditutup total. MUI Kabupaten Tegal menilai bahwa penutupan tempat ibadah akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena masyarakat Kabupaten Tegal mayoritas beragama Islam. Wakil Ketua MUI, Tubagus Fahmi menyatakan bahwa tempat ibadah seharusnya bisa menjadi sentra edukasi bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona yang tengah melonjak saat ini.

⁶⁹ Purwandi, Pranata Humas Diskominfo Kabupaten Tegal, Wawancara Pribadi, Tegal, 17 April 2023.

Diskominfo Kabupaten Tegal dalam menangani pemberitaan negatif tersebut melakukan analisis berita dengan mengidentifikasi dan menganalisis berita tersebut. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis lalu pranata humas memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Pemda Kabupaten Tegal untuk mensosialisasikan kebijakan PPKM Darurat dengan memfokuskan bahwa penutupan tempat ibadah itu bukan hanya di masjid namun semua tempat peribadatan agama di Kabupaten Tegal serta menekankan bahwa penutupan tersebut bukan menghalangi masyarakat untuk beribadah namun hanya mengalihkan sementara tempat ibadah ke rumah masing-masing untuk mencegah penularan COVID-19. Selain memberikan rekomendasi kepada Pemda Kabupaten Tegal, Diskominfo Kabupaten Tegal juga ikut terlibat dalam publikasi untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan PPKM Darurat di beberapa media. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh media lain.

“Setelah Pemda merespon berita MUI meminta tempat ibadah tidak ditutup, Diskominfo biasanya ikut mensosialisasikan kebijakan PPKM Darurat melalui media massa, menggandeng media *relations*, baliho dan *banner*.”⁷⁰

Berita keagamaan pada masa pandemi COVID-19 selain MUI Kabupaten Tegal meminta tempat ibadah jangan ditutup terdapat berita terkait penolakan vaksinasi di Kabupaten Tegal. Media *online* Suara Merdeka merilis berita berjudul “Sebagian Masyarakat Kabupaten Tegal

⁷⁰ Kusnianto, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Wawancara Pribadi, Tegal, 22 Juni 2023.

Menolak Vaksinasi, Taj Yasin Lakukan Pendekatan Khusus”. Berita tersebut diidentifikasi negatif karena dapat membentuk persepsi bahwa Pemda Kabupaten Tegal tidak bisa mempercepat kebijakan vaksinasi yang saat itu menjadi kebutuhan masyarakat. Berita tersebut menarasikan bahwa Pemerintah Jawa Tengah menghimbau kepada pemimpin daerah Kota atau Kabupaten untuk melakukan vaksinasi hingga mencapai 70 persen. Namun Kabupaten Tegal tercatat vaksin dosis pertama capaian 63,18 persen. Sebagian warga Kabupaten Tegal khususnya di Kecamatan Bojong menolak vaksinasi yang diduga terpengaruh oleh ulama. Menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin mengatakan bahwa masyarakat Kecamatan Bojong yang cenderung memegang perkataan beberapa tokoh.

Diskominfo Kabupaten Tegal dalam menangani pemberitaan negatif tersebut melakukan analisis berita dengan mengidentifikasi dan menganalisis berita tersebut. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis lalu pranata humas memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Pemda Kabupaten Tegal untuk mensosialisasikan keamanan vaksin dan pentingnya program vaksinasi untuk menjaga kekebalan tubuh. Selain memberikan rekomendasi kepada Pemda Kabupaten Tegal, Diskominfo Kabupaten Tegal juga ikut terlibat dalam publikasi untuk meningkatkan sosialisai keamanan vaksin di beberapa media. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar dapat melakukan program vaksinasi.

Dari hasil wawancara menemukan data bahwa Diskominfo Kabupaten Tegal melakukan pengelolaan isu dimulai dari kegiatan media monitoring. Untuk berita yang bersifat negatif diproses ke tahap analisis berita. Analisis berita meliputi identifikasi dan penyajian fakta dengan tahapan mencari sumber berita, narasumber dalam anatomi berita, respon atau penilaian berita lalu dikategorikan ke dalam *top newstrend*. Setelah itu, berita negatif dianalisis serta diberikan rekomendasi tindak lanjut untuk merespon berita negatif tersebut.

Setelah analisis berita telah diselesaikan, maka hasil dari analisis berita negatif dilaporkan kepada kepala bidang IKP. Lalu dilaporkan kepada kepala Diskominfo yang kemudian dilaporkan kepada Sekda serta ditembusi kepada Bupati. Sehingga Bupati dapat menentukan kebijakan dan memerintahkan OPD terkait dengan berita tersebut.



BAB IV

ANALISIS HASIL STRATEGI MONITORING BERITA KEAGAMAAN OLEH DISKOMINFO KABUPATEN TEGAL PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Analisis Strategi Monitoring Berita Keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi COVID-19

Pengelolaan informasi menjadi hal yang terpenting bagi organisasi sebagai bentuk melihat perkembangan informasi sebuah organisasi. Media monitoring juga berfungsi untuk mengidentifikasi potensi isu serta menjadi alat untuk pengelolaan isu di organisasi. Diskominfo Kabupaten Tegal menggunakan media monitoring berita keagamaan pada masa pandemi COVID-19. Hal ini digunakan untuk memantau informasi di media terkait berita yang mencakup keagamaan.

Penelitian ini menggunakan analisis teori media monitoring dari William J. Comcowih untuk mengetahui upaya Diskominfo Kabupaten Tegal dalam monitoring berita keagamaan pada masa pandemi COVID-19. Adapun analisis teori media monitoring diantaranya:

1. Mencari dan Mengumpulkan Berita di Berbagai Media

Mencari dan mengumpulkan berita di berbagai media *online* merupakan langkah awal untuk memantau pemberitaan. Diskominfo Kabupaten Tegal melakukan pemantauan berita keagamaan menggunakan media lokal atau media yang beroperasi di daerah

Kabupaten Tegal yang berjenis media *online* atau *portal* berita. Diskominfo Kabupaten Tegal memilih enam *portal* berita *online* untuk memantau berita keagamaan pada masa pandemi COVID-19. diantaranya Tribun Jateng (jateng.tribunnews.com), Radar Tegal (radartegal.com), Kabar Tegal (kabartegal.pikiran-rakyat.com), Ayo Tegal (ayotegal.com), Pantura Post (panturapost.com) serta Suara Merdeka Pantura (pantura.suaramerdeka.com). Pemilihan media *online* didasari karena media tersebut merupakan *portal* berita yang mempublikasikan informasi di lingkup Kabupaten Tegal.

Klasifikasi media ini untuk memilih media massa yang menyampaikan berita tentang organisasi. Pemilihan media juga sebagai tahapan mengumpulkan berita.⁷¹ Diskominfo Kabupaten Tegal mengklasifikasikan media *online* di media lokal. Pemilihan media *online* ini dilakukan untuk mempermudah pencarian berita yang mencakup wilayah Kabupaten Tegal. Pengumpulan berita dilakukan dengan membuka *portal* media dan memilih fitur untuk wilayah Kabupaten Tegal. Sehingga pemberitaan yang disajikan oleh *portal* tersebut telah hanya berita yang berada di Kabupaten Tegal. Hal ini sangat memudahkan bagi pranata humas untuk memperoleh berita dengan cakupan wilayah Kabupaten Tegal.

⁷¹ M Ismail Alif et al., "Analisis Isi Dalam Kegiatan Media Monitoring Program Nasional PNPM Mandiri Pedesaan Yang Dipublikasikan Melalui Media Daring," (Pekanbaru: *Jurnal Akrab Juara* Vol. 5, No. 1, Februari 2020), hlm. 206.

2. Mengklasifikasikan atau memilih dan memilah berita

Diskominfo Kabupaten Tegal memiliki klasifikasi berita yang di monitoring. Pengklasifikasi berita di Diskominfo Kabupaten Tegal disebut dengan istilah *top newstrend*. Penentuan atau parameter *top newstrend* untuk menentukan kategori berita yang telah dipublikasikan oleh media. Terdapat lima *top newstrend* yang digunakan dalam media monitoring yaitu kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal, keadaan umum Kabupaten Tegal, kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal, fasilitas umum Pemerintah Kabupaten Tegal dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Parameter dalam klasifikasi berita kegiatan pemerintah Kabupaten Tegal yaitu Berita yang berisi kegiatan serimonial. Klasifikasi berita keadaan umum Kabupaten Tegal memiliki parameter berita tentang kondisi baik masyarakat maupun kondisi Kabupaten Tegal sifatnya secara umum. Klasifikais berita kinerja Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki parameter berita tentang pencapaian pemerintah baik secara kualitas maupun kuantitas. Klasifikasi berita fasilitas umum Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki klasifikasi berita yang menginformasikan tentang kondisi fasilitas umum di Kabupaten Tegal. Klasifikasi berita kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki parameter berita terkait sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah yang ada dasarnya.

Mengklasifikasikan atau memilih berita bertujuan untuk mengklasifikasikan pemberitaan yang berkaitan dengan pencarian kata

kunci yang bertujuan untuk menganalisis konten yang dipantau.⁷² Diskominfo Kabupaten Tegal menentukan *top newstrend* bertujuan untuk menentukan konsistensi dari serangkaian pengukuran. Hal ini dapat dikatakan bahwa *top newstrend* adalah sebagai alat ukur untuk mengukur berita yang telah dipublikasikan. Penggunaan *top newstrend* juga mempermudah klasifikasi pemberitaan dan mempermudah pelaksanaan media monitoring di Kabupaten Tegal.

Setelah menentukan media *online* untuk mendapatkan berita. Pranata humas membaca keseluruhan berita untuk mengukur berita tersebut masuk ke dalam klasifikasi *top newstrend*. Setelah membaca keseluruhan berita, pranata humas dapat menentukan berita tersebut masuk ke kategori yang telah dibuat.

3. Mengkliping atau mengumpulkan berita

Mengkliping berita merupakan tahapan pengumpulan berita yang berkaitan dengan organisasi oleh media.⁷³ Diskominfo Kabupaten Tegal dalam mengkliping berita di media *online* dikumpulkan menjadi satu dan disusun dengan format tabulasi. Pengumpulan berita ini meliputi tanggal publikasi berita, judul berita, nama media, respon, kategori atau *top newstrend* serta pranala atau *link* halaman berita. Pengumpulan berita ini dimaksudkan sebagai rekam jejak pemberitaan yang telah di publikasi oleh media.

⁷² Alif et al, hlm 207.

⁷³ Alif et al, hlm 208.

Proses kliping pada *portal* berita tidak jauh berbeda dengan kliping pada media cetak. Perbedaannya dalam pencarian dan pengumpulan dilakukan di komputer. Namun proses tersebut masih tergolong tradisinoal karena pencarian dan mengumpulkan digunakan dengan memakai sumber daya manusia. Sehingga untuk mencari dan menggumpulkan berita dilakukan secara manual sedangkan pemberitaan di *portal* berita lebih cepat daripada pemberitaan di media cetak.

4. *Executive summary*

Excutive summary merupakan pokok berita dari beragam media yang disusun berdasarkan mekanismenya meliputi pemerataan berita dan pencatatan sumber, tanggal dan halaman media.⁷⁴ Proses ini dilakukan bersamaan dengan proses kliping. Dapat dikatakan bahwa kliping dan *executive summary* dilakukan untuk mengumpulkan, mengarsipkan dan mendokumentasikan sumber data berita. Hal ini dilakukan untuk arsip aktivitas media dalam mempublikasikan sebuah berita.

5. *Tone* berita

Tone berita adalah sebuah penilaian yang dilakukan setelah membaca keseluruhan isi berita. Diskominfo Kabupaten Tegal menggunakan *tone* berita dengan istilah respon berita. Diskominfo Kabupaten Tegal juga membuat tolak ukur atau parameter untuk menentukan berita yang di monitoring termasuk dalam kategori respon

⁷⁴ Alif et al, hlm 208.

yang telah ditentukan. Diskominfo Kabupaten Tegal mengkategorikan menjadi tiga jenis;

a. Positif

Berita dengan respon positif jika berita tersebut pencapaian diatas target.

b. Netral

Berita dengan respon netral jika berita tersebut tidak memiliki efek apapun biasanya bersifat informatif, netral dan umum.

c. Negatif

Berita dengan respon negatif jika berita tersebut memiliki potensi atau implikasi negatif kepada pemerintah.

Setelah melewati proses pencarian, pengumpulan, kliping dan *excutive summary*. Langkah selanjutnya pranata humas memberikan penilaian untuk berita yang di monitoring. Hal ini dilakukan untuk mengetahui berita mana yang memiliki respon positif, netral, atau negatif. Untuk berita yang memiliki respon negatif akan segera ditindaklanjuti karena berita dengan respon negatif akan memberikan persepsi yang negatif kepada pemerintah Kabupaten Tegal. Sehingga melalui media monitoring ini dapat ditemukan berita-berita yang berpotensi buruk kepada pemerintah.

6. Tabulasi

Tabulasi merupakan pembuatan tabel-tabel yang berisi data analisis pemberitaan.⁷⁵ Pada hal ini, Diskominfo melakukan tabulasi untuk menyatukan hasil media monitoring pada satu tabel atau format. Tabulasi yang digunakan pada media monitoring baik berjenis *media clipping* ataupun analisis berita. Untuk tabulasi yang digunakan hampir sama, tetapi untuk analisis berita terdapat tabulasi terkait analisis berita dan rekomendasi tindaklanjut.

No	Tanggal Berita	Judul Berita	Media	Respond	Kategori	Link
1.	5 Juli 2021	MUI Minta Tempat Ibadah Jangan Diturup Total	SM pantura	Negatif	Keadaan Umum	https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/pr-06425506/mui-minta-tempat-ibadah-jangan-diturup-total
2.	2 Februari 2022	Kisah Pilu Ayah Anak Kembar yang Meninggal Tenggelam di Sungai, Selalu Bersama Syhidup Semati	SM pantura	Negatif	Keadaan Umum	https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042313786/sebagian-masyarakat-kabupaten-tegal-menolak-vaksinasi-taj-yasin-lakukan-pendekatan-khusus

Tabel 4.1 Format Tabulasi *Media Clipping*

Sumber Berita	Tanggal	Isi Berita	Narasumber	Respon	Kategori
SM pantura https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-raya/pr-06425506/mui-minta-tempat-ibadah-jangan-diturup-total	5/07/2021	<p>Judul Berita : MUI Minta Tempat Ibadah Jangan Diturup Total</p> <ul style="list-style-type: none"> - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tegal meminta tempat ibadah jangan ditutup total saat penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali. Hal itu dinilai akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, karena masyarakat Kabupaten Tegal mayoritas beragama Islam. Kebijakan lain yang dilakukan adalah menghentikan sementara pengiriman hewan ternak terutama yang berasal dari daerah episentrum atau penemuan wabah diluar Kabupaten Tegal - Menurut Tubagus, tempat ibadah seharusnya bisa menjadi sentra edukasi bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona yang tengah melonjak saat ini. - Dia memohon kepada Pemkab Tegal supaya lebih arif dan bijaksana dalam melaksanakan PPKM Darurat. Utamanya dalam penutupan tempat ibadah. Sebab, tidak lama lagi umat Islam juga akan merayakan Idul Adha. Dimana setiap Hari Raya itu, kaum muslim akan menjalankan salat Ied berjamaah dan menggelar penyembelihan hewan kurban. 	Tubagus Fahmi – Wakil Ketua MUI Kabupaten Tegal	Negatif	Keadaan Umum

⁷⁵ Alif et al, hlm 208.

Judul Berita	Analisa Isi Berita	Tindak Lanjut
MUI Minta Tempat Ibadah Jangan Ditunggal Total	- Penutupan aktivitas tempat ibadah bukan hanya masjid bukan melarang ibadah hanya mengalihkan tempat ibadah ke rumah masing-masing agar tidak menimbulkan COVID-19.	- Pemda Kabupaten Tegal untuk mensosialisasikan kebijakan PPKM Darurat dengan memfokuskan bahwa penutupan tempat ibadah itu bukan hanya di masjid namun semua tempat peribadatan agama di Kabupaten Tegal serta menekankan bahwa penutupan tersebut bukan menghalangi masyarakat untuk beribadah namun hanya mengalihkan sementara tempat ibadah ke rumah masing-masing untuk mencegah penularan COVID-19.

Sumber Berita	Tanggal	Isi Berita	Narasumber	Respon	Kategori
SM pantura https://www.suaramerdeka.com/jawa-tengah/pr-042313786/sebagian-masyarakat-kabupaten-tegal-menolak-vaksinasi-taj-yasin-lakukan-pendekatan-khusus	4/01/2022	Judul Berita : Sebagian Masyarakat Kabupaten Tegal Menolak Vaksinasi, Taj Yasin Lakukan Pendekatan Khusus - sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi lantaran diduga terpengaruh oleh ulama. - Diketahui Kabupaten Tegal disebut memiliki capaian vaksinasi yang relatif rendah. - Hingga saat ini, capaian vaksin dosis pertama di Kabupaten Tegal mencapai 63,18 persen.	Taj Yasin Maimoen – Wakil Gubernur Jawa Tengah	Negatif	Keadaan Umum

Judul Berita	Analisa Isi Berita	Tindak Lanjut
Sebagian Masyarakat Kabupaten Tegal Menolak Vaksinasi, Taj Yasin Lakukan Pendekatan Khusus	- Penolakan sebagian warga Kecamatan Bojong terhadap vaksinasi karena terpengaruh tokoh setempat.	- Pemda Kabupaten Tegal untuk mensosialisasikan keamanan vaksin dan pentingnya program vaksinasi untuk menjaga kekebalan tubuh.

Tabel 4.1 Format Tabulasi Analisis Berita

7. *Resume dan report*

Resume dan report merupakan sebuah ringkasan dan laporan kegiatan media monitoring.⁷⁶ Diskominfo Kabupaten Tegal melakukan media monitoring setiap harinya dan setiap akhir bulan hasil media monitoring tersebut disusun *resume* dan *report*. *Resume* dan *report* berisi terkait data berita yang telah di monitoring setiap media. Sehingga dapat diketahui media mana yang paling banyak dalam mempublikasikan berita Kabupaten Tegal. Jumlah berita tersebut juga di-*breakdown* sesuai kategori respon berita dan *top newstrend*.

⁷⁶ Alif et al, hlm. 208.

Untuk *resume* dan *report* media monitoring yang dilakukan oleh pranata humas diserahkan kepada kepala bidang IKP serta dilaporkan kepada kepala dinas. Sedangkan untuk pemberitaan negatif di-*breakdown* dengan analisis berita. Namun untuk analisis berita langsung dilaporkan pada hari itu juga. Sehingga Diskominfo Kabupaten Tegal langsung melaporkan kepada Sekda serta di tembusi kepada Bupati untuk acuan menentukan kebijakan pimpinan daerah.

B. Analisis Strategi Pengelolaan Isu Keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi COVID-19

Munculnya bidang *public relations* dianggap diperlukan untuk setiap organisasi. Keberadaan *public relations* yang handal semakin diperlukan untuk berbagai kegiatan, acara bahkan urusan yang melibatkan masyarakat luas. *Public relation* berperan dalam menanggulangi sebuah isu organisasinya. Manajemen isu berperan untuk memprediksi, menilai dan mengatasi isu yang berdampak pada organisasi.⁷⁷

Menurut Howard Chase, manajemen isu ini merupakan sebuah teknik untuk mengenali, mengevaluasi dan menangani isu.⁷⁸ Pengelolaan isu ini untuk mempersempit atau menghilangkan kesenjangan. Diskominfo Kabupaten Tegal juga melakukan pengelolaan isu berdasarkan media monitoring. Isu yang dikelola bersumber dari berita yang bersifat negatif.

⁷⁷ Scott M Cutlip, Allen H Center, and Glen M Broom, "*Effective Public Relations*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 24.

⁷⁸ Kriyantono, *Public Relations & Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relation, Etnografi Kritis & Kualitatif*, hlm 153.

Berita yang bersifat negatif dapat menjadikan isu, sehingga ketika ditemui berita negatif sebaiknya langsung direspon untuk ditindaklanjuti agar isu yang muncul dapat ditangani.

Masa pandemi COVID-19, media *online* sangat berperan dalam penyampain informasi, mulai dari sosialisasi terkait COVID-19, kebijakan pada masa pandemi bahkan aspirasi publik juga disampaikan di media *online*. Seperti berita kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali dimana beberapa tempat atau kegiatan yang dapat menimbulkan massa ditutup sementara. Kabupaten Tegal juga menerapkan kebijakan PPKM Darurat. Namun perihal penutupan sementara tempat ibadah di Kabupaten Tegal membuat MUI Kabupaten Tegal angkat bicara. Bahkan MUI meminta untuk tempat ibadah jangan ditutup total pada saat pemberlakuan PPKM Darurat.

Melalui pemberitaan tersebut, Diskominfo Kabupaten Tegal mengenali isu tersebut dengan mengidentifikasi berita sebagai berita negatif, karena pemberitaan tersebut akan menimbulkan persepsi negatif terhadap pemerintah Kabupaten Tegal bahwa pemerintah tidak memperbolehkan untuk beribadah di tempat ibadah. Setelah ditemukan dan diidentifikasi bahwa berita tersebut memiliki respon negatif. Diskominfo Kabupaten Tegal melakukan evaluasi yaitu dengan menilai berita tersebut. Pemberitaan MUI Kabupaten Tegal meminta tempat ibadah jangan di tutup total pada PPKM Darurat dinilai akan menimbulkan persepsi publik sehingga Diskominfo Kabupaten Tegal mengevaluasi kemunculan isu tersebut dengan menganalisis berita tersebut.

Proses analisis berita ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyajikan fakta-fakta berita. Identifikasi dan penyajian berita untuk mengetahui fakta berita tersebut. Faktanya bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tegal meminta tempat ibadah jangan ditutup total saat penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali. Hal itu dinilai akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, karena masyarakat Kabupaten Tegal mayoritas beragama Islam. Kebijakan lain yang dilakukan adalah menghentikan sementara pengiriman hewan ternak terutama yang berasal dari daerah episentrum atau penemuan wabah diluar Kabupaten Tegal. Menurut Tubagus, tempat ibadah seharusnya bisa menjadi sentra edukasi bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona yang tengah melonjak saat ini. Dia memohon kepada Pemkab Tegal supaya lebih arif dan bijaksana dalam melaksanakan PPKM Darurat. Utamanya dalam penutupan tempat ibadah. Sebab, tidak lama lagi umat Islam juga akan merayakan Idul Adha. Dimana setiap Hari Raya itu, kaum muslim akan menjalankan salat Ied berjamaah dan menggelar penyembelihan hewan kurban.

Melalui tahap mengenali dan mengevaluasi isu tersebut, Diskominfo Kabupaten Tegal dapat mengetahui bahwa berita tersebut jika tidak cepat direspon akan menimbulkan potensi konflik. Proses ini juga sebagai pendeteksi isu secara dini. Sehingga isu tersebut harus segera ditangani dan Pemda Kabupaten Tegal dapat mengambil tindakan sebelum isu itu semakin besar. Melalui tahap mengenali dan mengevaluasi, Diskominfo Kabupaten Tegal akan mengetahui bagaimana cara menangani isu tersebut karena berita

tersebut telah dikatakan sebagai isu dan telah di evaluasi dengan menganalisis berita tersebut sehingga menghasilkan fakta yang terjadi.

Diskominfo Kabupaten Tegal menangani isu dengan memberikan rekomendasi tindaklanjut kepada Pemda Kabupaten Tegal dalam kemunculan isu tersebut. Diskominfo Kabupaten Tegal memberikan rekomendasi tindaklanjut berupa Pemda Kabupaten Tegal melakukan sosialisasi kebijakan PPKM Darurat dengan memfokuskan bahwa penutupan tempat ibadah itu bukan hanya di masjid namun semua tempat peribadatan agama di Kabupaten Tegal serta menekankan bahwa penutupan tersebut bukan menghalangi masyarakat untuk beribadah namun hanya mengalihkan sementara tempat ibadah ke rumah masing-masing untuk mencegah penularan COVID-19. Pada tahapan menangani isu tersebut, Diskominfo Kabupaten Tegal hanya memberikan cara merespon berita negatif tersebut tidak terjun dalam perencanaan teknis bagaimana teknis sosialisasi. Kebijakan tersebut sepenuhnya ditangani oleh pimpinan daerah. Setelah pimpinan daerah menentukan kebijakan teknis sosialisasi, pimpinan daerah akan memberikan perintah kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan sosialisasi kebijakan PPKM Darurat.

Pimpinan daerah memerintahkan Diskominfo Kabupaten Tegal sebagai pusat komunikasi dan informasi wilayah Kabupaten Tegal dengan ikut meningkatkan sosialisasi kebijakan PPKM Darurat kepada masyarakat Kabupaten Tegal bahwa penutupan sementara tempat ibadah bukan melarang masyarakat beribadah di tempat peribadatan. Diskominfo Kabupaten Tegal

menggunakan media berupa media massa, menggandeng *media relation*, baliho serta *banner*. Hal ini sebagai bentuk respon pemerintah dalam menangani isu pemberitaan negatif tersebut. Melalui tindakan respon tersebut Diskominfo Kabupaten Tegal tetap memonitoring berita untuk melihat perkembangan pemberitaan yang seimbang dengan pemberitaan tersebut.

Pada pemberitaan berjudul “Sebagian Masyarakat Kabupaten Tegal Menolak Vaksinasi, Taj Yasin Lakukan Pendekatan Khusus”. Berita tersebut dipublikasikan pada masa pandemi COVID-19 serta pada saat percepatan program vaksinasi untuk menjaga kekebalan imunitas tubuh. Pada masa gencarnya program vaksinasi, beberapa warga Kabupaten Tegal khususnya di Kecamatan Bojong menolak program vaksinasi. Beberapa diantaranya tidak mau melakukan vaksinasi. Penolakan tersebut diduga karena masyarakat Kecamatan Bojong masih memegang atau mempercayai perkataan ulama setempat. Melalui pemberitaan tersebut Diskominfo Kabupaten Tegal memonitoring berita tersebut.

Berita tersebut dinilai memiliki respon negatif. Pemberitaan negatif ini dikatakan sebagai isu. Hal itu Diskominfo Kabupaten Tegal langsung mengenali isu tersebut dengan mengidentifikasi bahwa berita tersebut memiliki potensi buruk kepada pemerintah. Identifikasi ini memuai bahwa berita tersebut dapat membangun persepsi publik karena Pemda Kabupaten Tegal tidak bisa mempercepat vaksinasi yang pada saat itu menjadi kebutuhan masyarakat.

Pada tahap evaluasi isu, Diskominfo Kabupaten Tegal langsung mengidentifikasi pemberitaan tersebut. Identifikasi tersebut menyatakan bahwa sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi lantaran diduga terpengaruh oleh ulama. Diketahui Kabupaten Tegal disebut memiliki capaian vaksinasi yang relatif rendah. Hingga saat ini, capaian vaksin dosis pertama di Kabupaten Tegal mencapai 63,18 persen.

Evaluasi isu tersebut dinilai sangat berpengaruh pada Pemda Kabupaten Tegal. Bahkan masyarakat Kecamatan Bojong lebih percaya dengan informasi yang dikatakan ulama setempat daripada informasi dari Pemda Kabupaten Tegal. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah terjun kelapangan untuk mengetahui terkait penolakan vaksin di daerah Kecamatan Tegal. Hal ini ulama setempat sangat berperan dalam penyampain informasi, sehingga Wakil Gubernur melakukan pendekatan khusus kepada ulama setempat untuk memberikan pengarahan terkait keamanan vaksin pada masa COVID-19.

Setelah mengenali dan mengevaluasi isu tersebut, Diskominfo Kabupaten Tegal melakukan penanganan berita negatif tersebut. Diskominfo Kabupaten Tegal memberikan rekomendasi tindaklanjut kepada Pemda Kabupaten Tegal untuk mensosialisasikan keamanan vaksin dan pentingnya program vaksinasi untuk menjaga kekebalan tubuh. Dalam menangani isu tersebut sama dengan kasus isu MUI meminta tempat ibadah jangan ditutup total pada saat PPKM Darurat. Diskominfo Kabupaten Tegal hanya

memberikan rekomendasi untuk merespon berita tersebut. Selanjutnya untuk keputusan kebijakan dilakukan oleh pimpinan daerah.

Setelah pimpinan daerah mengambil tindakan, pemimpin daerah memerintahkan Diskominfo Kabupaten Tegal untuk ikut berperan dalam meningkatkan sosialisasi keamanan vaksin COVID-19. Diskominfo Kabupaten Tegal menggunakan media berupa media massa, menggandeng *media relation*, baliho serta *banner*. Hal ini sebagai bentuk respon pemerintah dalam menangani isu pemberitaan negatif tersebut. Melalui tindakan respon tersebut Diskominfo Kabupaten Tegal tetap memonitoring berita untuk melihat perkembangan pemberitaan yang seimbang dengan pemberitaan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan atau hasil penelitian dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi Monitoring Berita Keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi COVID-19

Kegiatan media monitoring yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Tegal terdiri dari *media clipping* dan analisis berita. Pelaksanaan media monitoring dilakukan oleh pranata humas di bidang IKP. Pranata humas mencari serta mengumpulkan berita di berbagai media. Media yang dijadikan objek media monitoring Diskominfo Kabupaten Tegal terdiri dari Tribun Jateng (jateng.tribunnews.com), Radar Tegal (radartegal.com), Kabar Tegal (kabartegal.pikiran-rakyat.com), Ayo Tegal (ayotegal.com), Pantura Post (panturapost.com) serta Suara Merdeka Pantura (pantura.suaramerdeka.com). Diskominfo Kabupaten Tegal menggunakan media *online* dengan cakupan wilayah Kabupaten Tegal dalam memantau berita keagamaan pada masa pandemi COVID-19.

Proses selanjutnya yaitu mengklasifikasikan kategori berita. Diskominfo Kabupaten Tegal memiliki klasifikasi berita berupa *top newstrend*. *Top newstrend* terdiri dari kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal, keadaan umum Kabupaten Tegal, kinerja Pemerintah Kabupaten

Tegal, fasilitas umum Pemerintah Kabupaten Tegal dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal. Kemudian setelah diklasifikasi, proses kliping dan *executive summary* dilakukan secara bersama dengan mengumpulkan data terkait tanggal publikasi berita, judul berita, nama media, respon, kategori atau *top newstrend* serta pranala atau *link* halaman berita sebagai identitas sebuah berita yang telah dimonitoring.

Setelah membaca keseluruhan, pranata humas akan melakukan penilaian berita dengan tiga kategori yaitu positif, netral atau negatif. Hasil data media monitoring disusun menggunakan format tabulasi untuk mempermudah tahap pelaporan. Setiap akhir bulan, pranata humas akan menyusun ringkasan dan laporan kegiatan media monitoring untuk dilaporkan kepada kepala dinas.

2. Strategi Pengelolaan Isu Keagamaan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi Covid-19

Pengelolaan isu yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Tegal berlandaskan dengan kegiatan media monitoring. Melalui media monitoring dapat diketahui pemberitaan yang bersifat negatif. Untuk mengelola berita negatif, Diskominfo Kabupaten Tegal akan mengenali, mengevaluasi dan menangani pemberitaan negatif tersebut. Pada masa pandemi COVID-19 terdapat pemberitaan negatif terkait MUI meminta untuk tempat ibadah jangan ditutup total pada saat pemberlakuan PPKM Darurat dan sebagian masyarakat Kabupaten Tegal menolak vaksinasi.

Melalui media monitoring, pemberitaan tersebut dinilai memiliki potensi negatif kepada pemerintah Kabupaten Tegal.

Diskominfo Kabupaten Tegal setelah menemukan berita negatif tersebut langsung meresponnya dengan mengenali dan mengevaluasi berita tersebut. Berita tersebut diidentifikasi dan disajikan fakta berita. Sehingga melalui tahapan tersebut, Diskominfo Kabupaten Tegal dapat menangani berita tersebut dengan memberikan rekomendasi kepada pemimpin daerah untuk merespon pemberitaan tersebut agar isu tersebut tidak semakin besar bahkan menimbulkan konflik. Rekomendasi tindaklanjut ini hanya sebatas peresponan dalam pemberitaan tidak merekomendasikan secara teknis..

B. Saran

Dari penelitian ini saran yang akan diberikan diklasifikasikan menjadi dua yaitu saran praktis dan saran akademis:

1. Saran Praktis

Saran bagi Diskominfo Kabupaten Tegal diharapkan selalu memberikan peningkatan dalam kegiatan media monitoring untuk mengelola isu yang terpublikasi dalam media. Peneliti juga menyarankan agar dapat mengembangkan program menggunakan *artificial intelligence* (AI) sehingga dalam media monitoring *portal* yang digunakan lebih banyak bahkan dapat memonitoring melalui media sosial.

2. Saran Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya terutama diharapkan dapat mengukur tingkat keefektifitas dalam kegiatan media monitoring dan manajemen isu keagamaan pada masa pandemi COVID-19. Dari penelitian ini juga diharapkan muncul penelitian terkait program atau strategi mengelola isu yang lebih efektif dan efisien untuk *public relations* baik secara pemerintah ataupun *non* pemerintah.

